

- INCOME TAX - ACCOUNTING  
- MUNICIPAL

**ANALISIS INTERDEPENDENSI ANTARA  
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN  
PAJAK DI INDONESIA PERIODE : TH. 1980 - 2006**

**SKRIPSI**

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

C. 04/08

Lut  
a



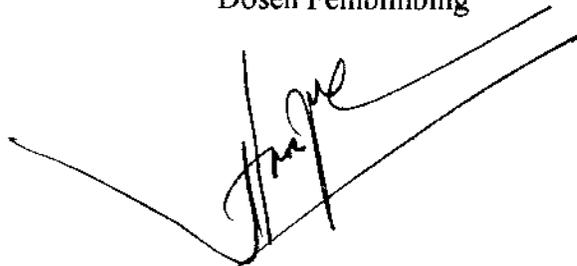
DIAJUKAN OLEH :  
**MUCHAMAD LUTFI**  
No. Pokok : 049916607

KEPADA  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**  
2007

Surabaya, 21-8-2007

Skripsi telah selesai dan siap untuk di uji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rochmad Djohar Djaelani', is written over two parallel diagonal lines that serve as a signature line.

**Drs. Ec. ROCHMAD DJOHAR DJAELANI**

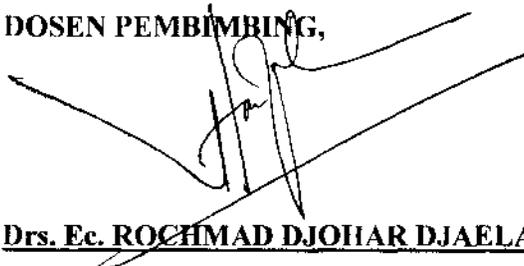
**SKRIPSI**

**ANALISIS HUBUNGAN INTERDEPENDENSI ANTARA  
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN  
PAJAK DI INDONESIA PERIODE : TH. 1980 – 2006**

**DIAJUKAN OLEH :  
MUCHAMAD LUTFI  
No. Pokok : 049916607**

**TELH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Drs. Ec. ROCHMAD DJOHAR DJAELANI**

**TANGGAL.....** 5-11-2007

**KETUA PROGRAM STUDI,**



**Dr. Hj. SRI KUSRENI, SE., MSi.**

**TANGGAL.....** 05-11-2007

## ABSTRAKSI

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang berisi berbagai program pembangunan dan sasaran-sasaran indikatif yang tercantum dalam repelita dan dijabarkan secara operasional dalam bentuk proyek-proyek pembangunan dan rencana pembiayaan yang lebih kongkrit. Sumber penyerapan dana adalah melalui penerimaan pajak.

Secara teoritis, pemerintah dapat pula melaksanakan suatu kebijakan dengan menentukan jumlah pengeluaran terlebih dahulu dengan membuat program pembangunan kemudian menentukan sumber-sumber pembiayaannya. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak memiliki signifikansi yang unik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah: melakukan analisis tentang hubungan interdependensi antara variabel pengeluaran pemerintah dan variabel penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan dalam bentuk perhitungan formulasi matematis yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis. Adapun alat analisis atau model penelitian menggunakan metode VAR (*Vector Auto Regression*) yang mengasumsikan semua variabel dalam penelitian merupakan variabel endogen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia terdapat hubungan yang searah dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak; tidak terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah; yang menyebabkan stabilitas penerimaan pajak dalam jangka panjang dan diperlukan adanya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

*Kata kunci* : pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, VAR

### ABSTRACTS

Nation's Development is an effort that increases, utilizes and develops resources (human and natural resources) through prosperity by government expenditures. Government expenditures itself contain several government's program and project with specific budget and indicative target. Meanwhile, it need for nation income to be allocated among those program and project. Main source of Indonesia's national income came from taxation (tax revenue).

But theoretically, government could determine its expenditure before income. Relationship between government expenditure and tax revenue has a unique signification in developing nation especially Indonesia.

This research aimed to analyze interdependent relationship between government expenditure and tax revenue. It uses quantitative approach that allowed formulating a mathematical model to solve the hypothesis. And Vector Auto Regression (VAR) is the analytical tools to derive the model in this research.

Results from VAR conclude that Indonesia has directional relationship for government expenditure to tax revenue; but there is no significant affect for that relationship; finally, it caused long term sustainability and extensive also intensification for tax revenue to promote economic growth.

*Key word(s) : government expenditure, tax revenue, VAR*

## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan persyaratan lulus menjadi sarjana S-1, juga untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan penulis untuk menganalisis seberapa jauh kemampuan penulis menganalisis mengenai pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan penelitian / skripsi ini, diantaranya :

1. ALLOH SWT yang telah melimpahkan rezeki, rahmat, karunia, hidayah, anugerah yang sangat besar kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tua, dan keluarga besar serta istriku yang telah membantu, mendoakan, memberi semangat serta segala pengorbanan kepada penulis selama ini.
3. Dosen pembimbing : Bapak Drs. Ec. Rochmad Djohar Djaelani. Terima kasih atas perhatian, kritik, saran, nasehat dan bantuan tenaga dan waktunya.
4. Dekan Fakultas Ekonomi : Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MSi.
5. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan : Ibu Dr. Hj. Sri Kusreni, SE., MSi dan Sekertaris Jurusan : Ibu Dr. Hj. Siti Umajah Masjkuri, atas segala bimbingan, didikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah di FE UNAIR.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas segala didikan dan bimbingan selama menuntut ilmu di FE UNAIR.
7. Erwin Hardianto atas segala bantuan tenaga dan waktunya.
8. Teman – teman Ekonomi Pembangunan, jurusan lain, teman – teman kantor BPS Pamekasan, dll yang membantu penulis selama ini
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstracts</i> .....	vi
Daftar isi.....	vii
Daftar table.....	x
Daftar Gambar/Grafik.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Konsep dan Kebijakan Anggaran.....	11
2.1.1.1. Fungsi dan Tujuan Anggaran.....	13
2.1.1.2. Sistem Penganggaran.....	15
2.1.2. Konsep Pengeluaran Pemerintah.....	16
2.1.2.1. Teori Adolp Wagner.....	18
2.1.2.2. Teori WW Rostow dan RA Musgrave.....	21

2.1.2.3. Teori Peacock dan Wiseman.....	21
2.1.3. Konsep dan Peran Perpajakan.....	25
2.1.3.1. Pengertian Pajak.....	25
2.1.3.2. Fungsi dan Manfaat Pajak.....	28
2.1.3.3. Teori Kurva Laffer.....	29
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	30
2.3. Hipotesis dan Model Analisis.....	33
2.3.1. Hipotesis.....	33
2.3.2. Model Analisis.....	34
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	37
3.2. Identifikasi Variabel.....	37
3.3. Definisi Operasional.....	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Analisis.....	39
3.6.1. Uji Prasyarat.....	39
3.6.1.1. Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi.....	39
3.6.1.2. Uji Kausalitas.....	42
3.6.1.3. Penetapan Lag Optimal.....	43
3.6.2. Metode Vector Autoregression (VAR).....	44
3.6.2.1. Responsi Terhadap Adanya Inovasi ( <i>Impulse Response</i> ).....	47
3.6.3. Uji Statistik.....	47
3.6.3.1. Uji R <sup>2</sup> (Koefisien Determinasi).....	47

	3.6.3.2. Uji t.....	48
	3.6.3.3. Uji F.....	49
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
	4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	51
	4.1.1. Variabel Penerimaan Pajak.....	51
	4.1.2. Variabel Pengeluaran Pemerintah.....	54
	4.1.3. Perkembangan Variabel Penelitian.....	59
	4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	61
	4.2.1. Uji Akar Unit.....	61
	4.2.2. Uji Kointegrasi.....	65
	4.2.3. Uji Lag Length Optimal.....	67
	4.2.4. Uji Kausalitas Granger.....	68
	4.2.5. Uji Vector Auto Regression.....	70
	4.2.6. Innovation Accounting.....	73
	4.2.6.1. Impulse Response Function.....	74
	4.2.6.2. Forecast Error Variance Decompositions.....	75
	4.3. Pembahasan.....	76
<b>BAB 5</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
	5.1. Simpulan.....	79
	5.2. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Realisasi Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan Dan Pengeluaran Pemerintah Tahun Anggaran 1981 – 2006.....	3
1.2. Realisasi Penerimaan Migas, Sektor Perpajakan & Bukan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri APBN Periode 1969 – 2003.....	6
4.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Tahun 1981/1982-2006.....	52
4.2. Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pengeluaran Pemerintah Tahun 1981/1982-2006.....	57
4.3. Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Indonesia Tahun 1981/1982-2006.....	58
4.4. Hasil Uji Akar Unit Variabel Pengeluaran Pemerintah.....	63
4.5. Hasil Uji Akar Unit Variabel Penerimaan Pajak.....	64
4.6. Hasil Uji Kointegrasi Johannsen.....	66
4.7. Estimasi Penentuan Panjang Lag.....	68
4.8. Hasil Uji Kausalitas Granger.....	69
4.9. Hasil Uji Var Dengan Variabel First Difference.....	71
4.10. Hasil Uji Var Dengan Variabel Level.....	72
4.11. Forecast Error Variace Decompositions.....	76

## DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	Halaman
2.1. Kurva Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional, Berdasarkan Hukum Wagner.....	20
2.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	24
2.3 Kurva Laffer.....	29
4.1. Gap Pertumbuhan Antara Penerimaan Pajak Dengan Pengeluaran Pemerintah.....	61
4.2. Impulse Response Function.....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya (Agustina Asikin, 1989:155). Di Indonesia, pembangunan nasional dilaksanakan dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan sejak 1 April 1969 yang diarahkan pada trilogi pembangunan yaitu; stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Salah satu alat atau instrumen dalam pelaksanaan trilogi pembangunan tersebut adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi refleksi kebijakan pemerintah. APBN bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh usaha pembangunan itu. Selama Orde Baru, kebijakan keuangan negara yang tercermin dalam APBN didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Namun kenyataannya secara konseptual APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Artinya, besarnya seluruh pengeluaran selalu melebihi penerimaan dalam negeri total dan kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran ditutup dengan pinjaman luar negeri. Namun setelah tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut sistem anggaran berimbang. Format dan struktur

APBN diubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997 membawa sebagian masyarakat Indonesia pada kondisi kehidupan sosial ekonomi yang memprihatinkan, yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran, naiknya harga barang dan turunnya daya beli masyarakat. Dalam kondisi demikian pemerintah melalui kebijakan anggaran melakukan usaha untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan mengarahkan alokasi belanja rutin yang ditujukan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan pada program proyek prasarana sosial.

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang berisi berbagai program pembangunan dan sasaran-sasaran yang tercantum dalam repelita dan dijabarkan secara operasional dalam bentuk proyek-proyek pembangunan dan rencana pembiayaan yang lebih kongkrit. Pengeluaran pembangunan dalam APBN menentukan arah dan pola alokasi sumber daya antar bidang, antar sektor dan antar kegiatan dalam masyarakat dan distribusi hasil pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pembangunan tersebut. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah menunjukkan semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan

**TABEL 1.1**  
**REALISASI PENGELUARAN RUTIN, PENGELUARAN**  
**PEMBANGUNAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TAHUN**  
**ANGGARAN 1981 – 2006**

Tahun	Pengeluaran Rutin (Milyar Rp)	%	Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rp)	%	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)
1981/1982	6,977.6	50.13	6,940.1	49.87	13,917.7
1982/1983	6,996.3	44.73	7,359.6	51.27	14,355.9
1983/1984	8,444.8	45.94	9,899.2	54.06	18,344.0
1984/1985	9,429.0	48.65	9,951.9	51.35	19,380.9
1985/1986	11,951.5	52.36	10,873.0	47.64	22,824.5
1986/1987	13,559.3	61.94	8,332.0	38.06	21,891.3
1987/1988	17,471.5	64.85	94,777.4	35.15	112,248.9
1988/1989	20,739.0	62.87	121,250.7	37.13	141,989.7
1989/1990	24,335.0	61.15	15,394.0	38.75	39,729.0
1990/1991	29,121.0	61.47	18,251.0	38.53	47,372.0
1991/1992	29,053.0	55.73	23,075.0	44.27	52,128.0
1992/1993	33,605.0	55.54	26,906.0	44.46	60,511.0
1993/1994	40,298.0	58.63	28,429.0	41.37	68,727.0
1994/1995	44,069.0	58.95	30,692.0	41.05	74,761.0
1995/1996	50,453.0	63.67	28,781.0	36.33	79,234.0
1996/1997	62,501.0	63.51	35,952.0	36.49	98,453.0
1997/1998	89,610.0	70.02	38,359.0	29.98	127,969.0
1998/1999	147,717.0	68.52	67,869.0	31.48	215,586.0
1999/2000	166,881.0	68.06	78,311.0	31.94	245,192.0
2000	164,087.0	85.08	28,769.0	14.92	192,856.0
2001	211,388.0	82.30	45,961.0	17.70	257,349.0
2002	179,188.0	78.19	49,976.0	21.81	229,164.0
2003	184,887.0	81.70	41,402.0	18.30	226,289.0
2004	191,821.0	80.79	45,613.0	19.21	237,434.0
2005	195,299.0	81.05	45,664.0	18.95	240,963.0
2006	187,336.0	80.90	44,226.0	19.10	231,562.0

Sumber: Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN*, berbagai tahun penerbitan

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya realisasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta proporsinya terhadap pengeluaran pemerintah tahun anggaran 1981/1982 – 2006. Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa umumnya pengeluaran pemerintah cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan

pengeluaran rutin mendominasi besarnya pengeluaran pemerintah jika dibandingkan dengan besarnya nilai pengeluaran pembangunan.

Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya juga menghadapi berbagai hambatan struktural maupun finansial. Pada tahap awal pembangunan sektor swasta yang belum kuat menyebabkan keberadaan anggaran pemerintah sangat berperan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun pada kenyataannya peran pengeluaran pembangunan yang besar dalam investasi masyarakat tidak diimbangi oleh besarnya penerimaan yang sepadan sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan belanja negara atau defisit dalam keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengadakan konsolidasi, rehabilitasi dan stabilisasi, serta melakukan pendekatan pada negara kreditur untuk dilakukannya penjadwalan kembali utang Indonesia. Selain itu, salah satu alternatif sumber penerahan dana adalah melalui penerimaan pajak.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor perpajakan merupakan pilihan yang tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil dibandingkan dengan sektor non migas yang cenderung berfluktuatif sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pungutan pajak ini mengurangi pendapatan individu tapi sebaliknya merupakan pendapatan negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Namun, meskipun pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari hasil ekspor migas dan penerimaan non migas seperti penerimaan perpajakan melalui kebijakan-kebijakan deregulasi,

kebutuhan investasi untuk membiayai pembangunan belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh tabungan pemerintah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya tabungan pemerintah, pertama, penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan non migas meliputi penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak dan kedua, pengeluaran rutin. Perubahan kedua faktor ini dengan sendirinya akan mempengaruhi besarnya tabungan pemerintah. Tidak stabilnya jumlah tabungan ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber dana dari luar negeri, sehingga perkembangan jumlah dana bantuan luar negeri cenderung meningkat setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan serangkaian undang-undang perpajakan untuk mengganti undang-undang lama peninggalan Belanda, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Reformasi Perpajakan Tahun 1983. Dalam perkembangan selanjutnya undang-undang perpajakan tersebut mengalami beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk menopang pembiayaan pembangunan sebagai alternatif pengganti dari penerimaan sektor migas. Selama periode setelah diberlakukannya undang-undang reformasi perpajakan, penerimaan pajak telah tumbuh sebesar 23,94 % rata-rata pertahun.

TABEL 1.2

**REALISASI PENERIMAAN MIGAS, SEKTOR PERPAJAKAN & BUKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI APBN PERIODE 1969 – 2003**

Tahun Anggaran	Penerimaan Migas		Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Bukan Pajak (milyar Rp)
	Realisasi (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	
1969/1970	48,3	-	173,1	-	24,8
1970/1971	68,8	42,44	220,8	27,56	49,0
1971/1972	112,7	63,81	259,1	17,35	41,9
1972/1973	196,5	74,36	339,1	30,88	56,2
1973/1974	347,5	76,84	546,9	61,28	80,8
1974/1975	957,3	175,48	737,6	34,87	75,7
1975/1976	1.200,6	25,42	931,9	26,34	111,8
1976/1977	1.586,8	32,17	1.150,7	23,48	129,0
1977/1978	1.948,7	22,81	1.238,2	7,61	152,6
1978/1979	2.308,7	18,47	1.766,0	42,62	245,9
1979/1980	4.259,6	84,50	2.249,9	27,40	189,0
1980/1981	7.019,6	64,79	2.891,7	28,53	315,7
1981/1982	8.627,8	22,91	3.248,4	12,34	336,4
1982/1983	8.170,4	-5,30	3.771,0	16,09	442,9
1983/1984	9.520,2	16,52	4.504,0	19,44	512,3
1984/1985	10.429,9	9,56	4.794,0	6,44	707,7
1985/1986	11.144,4	6,85	6.616,9	38,02	1.685,3
1986/1987	6.337,6	-43,13	7.645,7	15,55	2.215,8
1987/1988	10.047,2	58,53	8.779,4	14,83	1.716,5
1988/1989	9.527,0	-5,18	11.908,5	35,64	1.532,8
1989/1990	11.252,1	18,11	15.425,6	29,53	2.038,8
1990/1991	17.710,9	57,40	19.719,7	27,84	2.443,1
1991/1992	15.039,1	-15,09	24.058,4	22,00	2.593,1
1992/1993	15.331,0	1,94	30.092,0	25,08	3.440,0
1993/1994	12.507,7	-18,42	34.836,1	15,77	8.769,2
1994/1995	13.537,4	8,23	44.442,1	27,57	3.390,5
1995/1996	16.054,7	18,60	48.886,0	9,55	8.273,3
1996/1997	20.137,1	25,43	57.339,9	17,77	8.801,1
1997/1998	35.357,0	75,58	70.984,2	23,80	10.732,3
1998/1999	41.368,3	17,00	102.394,5	44,25	12.645,7
1999/2000	45.435,4	9,83	125.951,0	23,01	29.257,3
2000	66.661,0	46,72	115.912,5	-7,97	22.760,5
2001	81.040,9	21,57	185.540,9	60,07	34.017,7
2002	88.962,4	5,61	211.043,6	54,51	88.893,3
2003	95.841,5	15,25	248.468,4	2,57	94.031,5

Sumber: Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN*, berbagai tahun penerbitan

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa sejak Pelita I hingga Pelita III, ketergantungan penerimaan negara pada sektor migas sangat besar. Masa "oil boom" ini mencapai puncaknya pada tahun 1981 dimana harga minyak di pasar dunia mencapai US\$ 35 per barel dan terus menurun di tahun-tahun berikutnya.

Dihadapkan pada kesulitan selama Pelita III, maka pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan penghematan anggaran negara, sedangkan dari sisi fiskal pemerintah terus menggali penerimaan dari sektor perpajakan.

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya peranan sektor pajak dalam pembangunan. Namun hal ini tergantung pada kebijakan anggaran yang dianut, khususnya pada sisi pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak dan pinjaman pemerintah baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat pula melaksanakan suatu kebijakan dengan menentukan jumlah pengeluaran terlebih dahulu dengan membuat program pembangunan kemudian menentukan sumber-sumber pembiayaannya.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak memiliki signifikansi yang unik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan penganggaran di Indonesia dan negara berkembang lainnya biasanya mengalami *budget constraint* yang lebih besar dibandingkan negara maju. Pemerintah harus membuat suatu keputusan dalam penyusunan anggaran diantara dua kemungkinan, yaitu menaikkan penerimaan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah untuk menutup defisit fiskal penyesuaian dalam operasional fiskalnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan keadaan ini maka timbul pemikiran bahwa diduga terjadi interdependensi antara variabel penerimaan pemerintah dan variabel pengeluaran

pemerintah, dimana dari sisi penerimaan pemerintah diwakili oleh besarnya penerimaan pajak. Artinya, diduga dalam model persamaan perekonomian ini pengeluaran pemerintah (*dependent variable*) tidak sepenuhnya ditentukan oleh variabel penerimaan pemerintah (*independent variable*) secara sepihak, namun terdapat kemungkinan bahwa variabel penerimaan pemerintah juga ditentukan oleh variabel pengeluaran pemerintah sehingga kedua variabel tersebut dapat dikatakan saling mempengaruhi (interdependensi).

Mengingat pentingnya variabel pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak dalam penyusunan anggaran negara dan adanya *budget constraint* dalam penyusunan anggaran negara di Indonesia mendorong pemikiran untuk mengetahui bagaimana hubungan interdependensi antara variabel pengeluaran pemerintah dan variabel penerimaan pajak, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah hubungan interdependensi antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Indonesia periode 1980 – 2006?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana hubungan interdependensi antara variabel pengeluaran pemerintah dan variabel penerimaan pajak di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran negara.
2. Sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti lain yang tertarik pada masalah penyusunan anggaran negara yang menghadapi *budget constraint*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Selain itu, juga dibahas mengenai penelitian sebelumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

##### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisa yang dipakai untuk menjelaskan kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini.



membiayai pengeluaran tadi, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Walaupun secara akuntansi anggaran belanja Indonesia selalu berimbang, tetapi secara ekonomis sebenarnya defisit, hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) lebih besar dari pajak dalam persamaan keseimbangan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan konsep keseimbangan pendapatan nasional sebagai berikut (Rosyidi, S. 1995:208):

Pemerintah mempengaruhi penetapan keseimbangan pendapatan nasional melalui pengeluaran pemerintah ( $G$ ) atas barang dan jasa tanpa membedakan antara konsumsi pemerintah dengan investasi pemerintah yang merupakan komponen penerimaan agregat. Konsep pendapatan nasional:

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad \dots\dots\dots 2.1$$

Sisi kiri menyatakan penawaran agregat  $Y$ , dan sisi kanan disebut permintaan agregat ( $AD$ ) atas barang-barang domestik dan permintaan bersih dari luar ( $X - M$ ), selanjutnya adalah asal muasal hubungan yang sangat penting antara output dan pendapatan *disposable*. Sebagian dari pendapatan masyarakat dikeluarkan untuk pajak, dan sektor swasta menerima transfer netto ( $TR$ ) selain pendapatan nasional. Sehingga pendapatan disposable ( $YD$ ) sama dengan pendapatan ditambah dengan transfer dikurangi pajak:

$$YD = Y + TR - TA \quad \dots\dots\dots 2.2$$

Selanjutnya pendapatan *disposable* dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan.

$$YD = C + S \quad \dots\dots\dots 2.3$$

Dengan beberapa penyusunan ulang serta substitusi variabel, maka akan didapatkan:

$$S - I = (G + TR - TA) + NA \quad \dots\dots\dots 2.4$$

Persamaan 2.4 adalah sangat penting, karena tiga variabel pertama pada sisi kanan ( $G + TR - TA$ ) adalah defisit anggaran belanja pemerintah. ( $G + TR$ ) sama dengan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah ( $G$ ) ditambah pembayaran transfer pemerintah ( $TR$ ), yang merupakan seluruh pengeluaran pemerintah. ( $TA$ ) adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Selisihnya ( $G + TR - TA$ ) adalah kelebihan anggaran belanja yang defisit. Variabel kedua pada sisi kanan adalah kelebihan ekspor atas impor, atau surplus perdagangan ( $NA$ ).

Dalam penyusunan APBN harus mencerminkan posisi pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga akan terlihat : adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi; adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya; dan adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

#### 2.1.1.1 Fungsi dan Tujuan Anggaran

Menurut Musgrave (1989:7-13), fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Allocation Branch (to secure adjustment in the allocation resources)*

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana komposisi barang sosial tersebut ditentukan. Peran alokatif ini tidak sekedar melibatkan pemerintah sebagai pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya.

2. *Distribution Branch (to secure adjustment in the distribution of income and wealth)*

Fungsi distribusi politik anggaran belanja pemerintah termasuk fungsi klasik, yaitu pengeluaran dan penerimaan pemerintah mempunyai efek sosial ekonomis. Fungsi distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun jalur pengeluarannya. Secara khusus distribusi ini memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan perpajakan dan transfer.

3. *Stabilization Branch (to secure economic stabilization)*

Fungsi stabilisasi berkenaan dengan penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

### 2.1.1.2. Sistem Penganggaran

Dalam pelaksanaan kebijakan anggaran, terdapat beberapa alternatif sistem penganggaran bila dikaitkan dengan keadaan ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara berkembang yang bersangkutan, yaitu (Syamsi, Ibnu, 1994:64) :

#### 1. Sistem anggaran surplus

Digunakan pada saat keadaan ekonomi negara mengalami inflasi, untuk mengantisipasi perlu diseimbangkan kembali jumlah uang dan barang dengan menambah banyaknya barang yang beredar. Dengan sistem penganggaran surplus, maka kelebihan penerimaan uang digunakan untuk meningkatkan produksi barang. Cara ini merupakan keseimbangan (*equilibrium*) dinamis. Dapat juga digunakan cara keseimbangan statis, yaitu dengan cara kelebihan penerimaan pemerintah tidak dikeluarkan lagi, sehingga tidak ada kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat. Ekuilibrium dinamis lebih diharapkan daripada ekuilibrium statis.

#### 2. Sistem anggaran defisit

Sistem anggaran ini digunakan apabila keadaan ekonomi negara dalam keadaan deflasi, dimana jumlah barang dan jasa dalam masyarakat lebih besar daripada jumlah uang beredar. Pemerintah harus mengusahakan agar terjadi keseimbangan dari keduanya. Dalam sistem anggaran defisit ini berarti penerimaan uang negara lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya. Untuk memenuhi pengeluaran uang yang berlebihan itu diperlukan tambahan dana, misalnya dengan meningkatkan jumlah pinjaman luar negeri atau menciptakan uang baru. Dengan demikian maka

terjadi keseimbangan kembali antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat.

### 3. Sistem anggaran berimbang

Jika keadaan ekonomi suatu negara normal, di mana dalam negara itu terjadi inflasi, tetapi lajunya masih satu digit per tahun, berarti ada keseimbangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat.

#### 2.1.2. Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan untuk menghitung besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri, dalam arti semakin besar kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah dan semakin kecil kegiatan pemerintah maka semakin kecil pula pengeluaran pemerintah. Untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran agar selalu terjadi susunan APBN yang seimbang, maka harus diusahakan adanya pengaturan pengeluaran pemerintah, di antaranya dengan dilakukan efisiensi dalam pengeluaran negara, kriteria yang umumnya digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah adalah (Suparmoko, 1986 : 35) :

##### 1. Keadilan

Harus ada pengaturan yang jelas untuk menganalisis hal ini, misalnya dalam hal penentuan perpajakan dalam penentuan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, seperti pengenaan pajak yang lebih besar bagi orang yang memiliki tingkat penghasilan lebih tinggi dan pemberian

subsidi bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, atau pembagian tarif pajak, dalam hal ini pajak progresif, pajak proporsional maupun pajak regresif.

## 2. Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi ada apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik dan memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi ekonomi ini sering juga disebut *Pareto Optimality* yang diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu perekonomian tidak mungkin lagi mengadakan alokasi sumber-sumber yang menyebabkan di satu pihak akan lebih makmur dan pihak lain merugi, artinya bahwa kesejahteraan yang didapat oleh sekelompok orang tidak akan merugikan kesejahteraan kelompok yang lain.

## 3. Paternalisme

Dalam beberapa kasus, pemerintah mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, misalnya ketentuan anak umur tertentu harus masuk sekolah, tanpa mengingat apakah ada keinginan mereka untuk masuk sekolah. Kebijakan seperti itu disebut kebijakan paternalistik.

## 4. Kebebasan Perorangan

Pada umumnya orang memberi nilai tinggi terhadap kebebasan perorangan, maka dari itu pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perorangan ini harus sekecil mungkin. Kebebasan ini sulit dijabarkan secara kuantitatif seperti halnya dengan masalah keadilan (*equity*).

Apabila pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluarannya, maka hal ini akan mengurangi kebebasan wajib pajak untuk membelanjakan sebagian pendapatannya seperti yang dikehendaki.

Keempat kriteria di atas tidak dapat dipenuhi secara bersama-sama dalam tiap kebijakan pemerintah. Pada dasarnya kriteria efisiensi perpajakan mempunyai keterkaitan dengan keempatnya, sehingga diusahakan agar pelaksanaannya dapat berjalan bersama.

#### **2.1.2.1 Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### **2.1.2.1.1 Teori Adolph Wagner**

Adolph Wagner mengukur aktifitas pemerintah dalam perekonomian yang cenderung terus meningkat, dengan membandingkan pengeluaran pemerintah terhadap produksi nasional. Hal ini didasarkan oleh terjadinya perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap persentase GNP di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19.

Menurut Wagner dalam Dumairy (1997:162), perkembangan perekonomian menyebabkan hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi rumit dan kompleks. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin besar, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, budaya dan sebagainya. Dasar pandangan Wagner adalah teori organis mengenai pemerintah atau *Organic theory of state*, yang mengasumsikan pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Oleh Wagner,

temuan ini dinamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*) dan dapat dirumuskan dengan notasi :

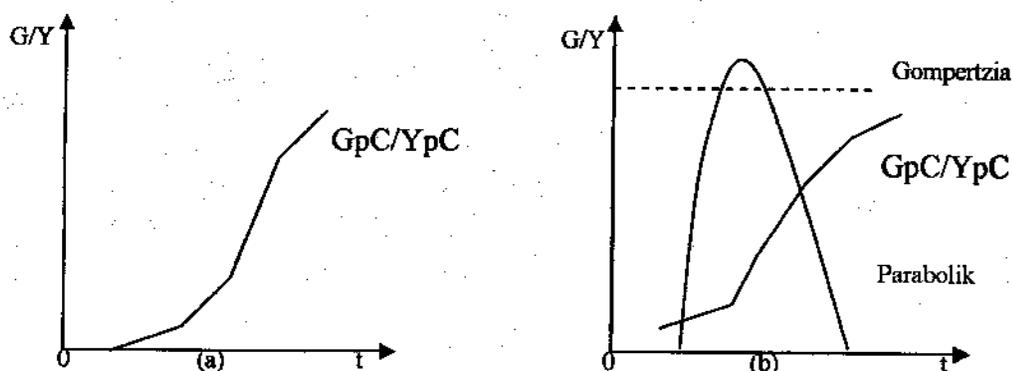
$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}} \dots \dots \dots 2.5$$

Dimana :  $GpC$  adalah pengeluaran pemerintah per kapita

$YpC$  adalah produk atau pendapatan nasional per kapita

$t$  adalah indeks waktu

Menurut Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan untuk meningkatkan perlindungan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan tidak efisien birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.



Sumber: Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga

**GAMBAR 2.1**  
**KURVA RASIO PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP**  
**PENDAPATAN NASIONAL, BERDASARKAN HUKUM WAGNER**

Gambar 2.1a menunjukkan secara grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional ( $GpC/YpC$  atau  $G/Y$ ), sedangkan pada gambar 2.1b menunjukkan pola jangka panjang kurva rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Apakah dalam jangka panjang kurva tersebut akan berpola Gompertzian, yang artinya akan terdapat suatu batas maksimum tertentu pada rasio  $G/Y$ , ataukah akan berpola parabolik yang berarti sampai dengan suatu titik waktu tertentu, rasio  $G/Y$  akan kembali menurun.

Inti hukum Wagner menerangkan tentang semakin meningkatnya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. R.A. Musgrave menyebut hukum Wagner sebagai *Law of growing public expenditure* atau hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat. Setelah dipublikasikan dalam bahasa Inggris pada tahun 1958, hukum Wagner menjadi sangat terkenal dalam lingkungan akademisi dan telah diuji oleh beberapa peneliti dengan menggunakan data dari berbagai negara. (Dumairy, 1997 : 162).

#### **2.1.2.1.2. Teori WW Rostow dan RA Musgrave**

WW Rostow dan RA Musgrave dalam (Sukirno, Sadono 2000:106-108) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total atau pendapatan nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memicu pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi swasta juga meningkat. Pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan akan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

#### **2.1.2.1.3. Teori Peacock dan Wiseman**

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah akan senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran dan

mengandalkan penerimaan pajak, dan sebaliknya masyarakat tidak suka membayar pajak untuk membiayai pengeluaran tersebut. Teori Peacock – Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock -- Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu anggapan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pengeluaran pemerintah.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, peningkatan GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar.

Jika terjadi gangguan perang, yang akan menyebabkan keadaan normal tersebut terganggu, akan terjadi pergeseran tingkat pengeluaran pemerintah ke tingkatan yang lebih tinggi. Walaupun gangguan itu kemudian lenyap, hal ini tidak akan mengembalikan pengeluaran tadi ke tingkat semula, melainkan tetap berada pada tingkatan yang sama. Dalam hipotesis Peacock, terdapat 3 efek yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, yaitu : (Mangkusoebroto, Guritno, 1999 : 173)

1. Efek Pengalihan (*displacement effect*)

Yaitu efek yang timbul akibat adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah, misalnya

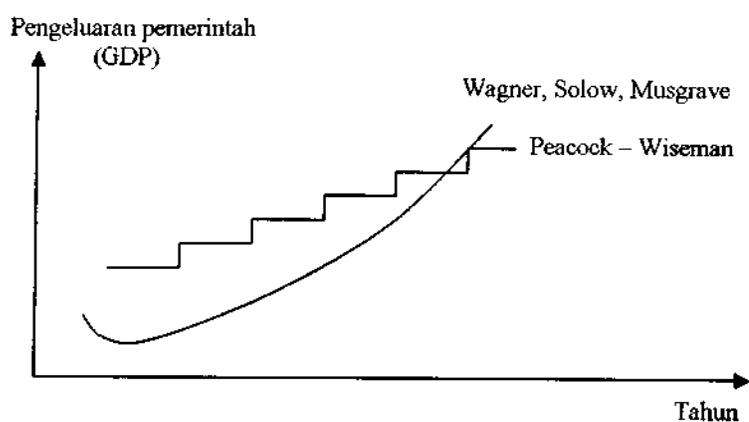
adanya gangguan perang yang tidak bisa hanya dibiayai dari penerimaan pajak, sehingga pemerintah harus mengadakan pinjaman ke luar negeri untuk membiayai perang. Setelah perang usai sebenarnya pemerintah bisa menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat di mana sebelum terjadi gangguan. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsuran hutang. Sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena peningkatan GNP tetapi juga karena pengembalian hutang dan bunga.

2. Efek Konsentrasi (*concentration effect*)

Konsep ini didasarkan pada adanya kecenderungan (*tendency*) bagi sektor ekonomi pemerintah pusat mengenai semakin meningkatnya peran aktivitas sektor ekonomi pemerintah (*public*) pada saat masyarakat sedang mengalami pertumbuhan ekonomi.

3. Efek Inspeksi (*inspection effect*)

Yaitu efek yang timbul karena masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah selesainya gangguan sosial tersebut. Misalnya dalam hal perang, serta perang selesai akan timbul masalah-masalah sosial seperti banyaknya anak yatim piatu, cacat veteran, dan sebagainya yang tidak terjadi sebelum adanya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus bertindak untuk menangani masalah itu dan masyarakat dapat memaklumi tindakan tersebut sehingga toleransi pajak meningkat.



Sumber: Mangkoesobroto, Guritno, 1999, *Ekonomi Publik*, hal. 174

**GAMBAR 2.2**

**PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH**

Perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock- Wiseman tidak berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.2. di mana sumbu horizontal menunjukkan perkembangan waktu (tahun) dan sumbu vertikal menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap GDP.

Wagner, Solow dan Musrage menyatakan bahwa kurva perkembangan pengeluaran pemerintah berbentuk garis lurus, dimana perkembangannya naik terus menerus. Sedangkan Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidaklah berbentuk suatu garis, tapi berbentuk seperti tangga, karena Peacock dan Wiseman mempertimbangkan adanya gangguan sosial seperti perang, bencana dll.

### **2.1.3. Konsep dan Peran Perpajakan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disahkan Presiden RI pada tanggal 17 Juli 2007 sebagai berikut (UU no 28 tahun 2007, 2007) :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Para ahli perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Salah satu definisi pajak dikemukakan oleh. PJA. Adriani Sebagai berikut (Erly Suandy ,2000:2) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Masih menurut PJA. Adriani, dari definisi diatas dapat dilihat ciri-ciri yang ada pada pajak, yaitu:

1. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dapat digunakan pula untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (fungsi Budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur). Sebagai alat anggaran (*budgetary*) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan rutin. Dalam fungsinya sebagai pengatur (*regulatory*), dimaksudkan untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Berdasar pada konsep keseimbangan nasional, penerimaan perpajakan (T) tidak termasuk dalam komponen permintaan agregat (AD). Pajak mempengaruhi permintaan agregat secara tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap *disposable income*, dan selanjutnya berdampak pada pengeluaran konsumsi (C). apabila besarnya pajak (T) naik sebesar  $\Delta T$ , maka *disposable income* akan turun sebesar jumlah yang sama, dan pengeluaran AD melalui multiplier dengan (Rosyidi, Suherman, 1998 : 212) :

$$\Delta AD = \frac{1}{1-c} \Delta C \text{ atau } \Delta AD = \frac{-c}{1-c} \Delta T \dots\dots\dots (2.5)$$

Penurunan *agregat demand* sebesar ini akan mempunyai dampak berantai yaitu akan menurunkan tingkat harga dan tingkat *output* (bersifat deflasioner). Apabila penerimaan perpajakan digunakan untuk sumber pembiayaan program (pengeluaran) pemerintah, maka pengaruh netto dari kebijaksanaan perpajakan dan pengeluaran ini belum tentu bersifat deflasioner. Hal ini tergantung apakah penerimaan perpajakan digunakan seluruhnya atau sebagian.

Masalah utama dalam pajak bila dikaitkan dengan pemerataan adalah siapa sebenarnya yang menanggung beban pajak. Untuk menganalisis beban yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak dapat ditempuh dalam 2 (dua) cara. Pertama, dengan mengaitkan beban itu dengan program pengeluaran pemerintah, seperti diketahui bahwa pajak yang dipungut akan menimbulkan beban kemudian hasil pungutan tersebut dipakai untuk membiayai program pengeluaran pemerintah yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada para pembayar pajak. Cara ini disebut *balanced budget incidence*. Hal ini diperkuat oleh hasil pemikiran Barrow (2001) pendukung Ricardian Equivalence yang menyatakan bahwa pajak menyesuaikan pengeluaran pemerintah, artinya kenaikan penerimaan pajak sebagai hasil dari tingginya pengeluaran fiskal, dan dalam hal ini terdapat hubungan kausal yang bergerak dari pengeluaran pemerintah ke penerimaan perpajakan pemerintah (satu arah). Di sisi lain *supply side economist* seperti Milton Friedman (1982) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu kenaikan pajak hanya disebabkan oleh naiknya pengeluaran dan bukan dari pengurangan defisit, terdapat adanya hubungan kausal dari penerimaan perpajakan pemerintah ke pengeluaran pemerintah.

Kedua, dengan melihat pengeluaran pemerintah tertentu dibiayai oleh satu jenis pajak. Bagaimana akibat pembebanannya bila jenis pajak diganti dengan jenis pajak yang lain untuk membiayai jumlah pengeluaran yang sama. Cara ini disebut *defferential incidence*.

#### 2.1.3.2 Fungsi dan Manfaat Pajak

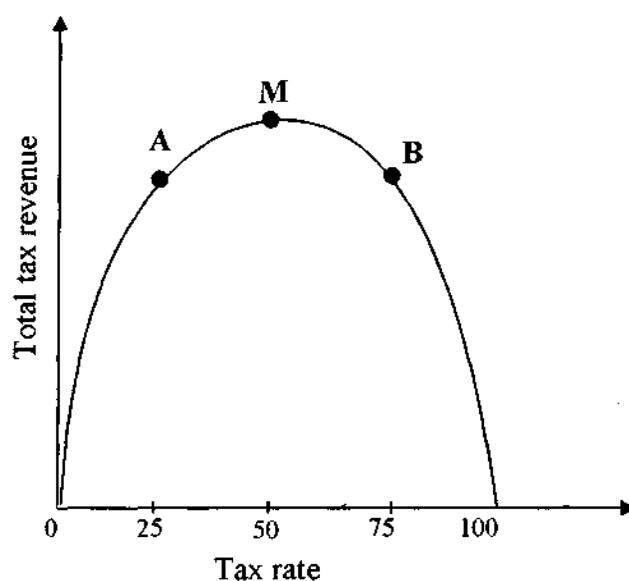
Fungsi dan manfaat pajak secara rinci diuraikan oleh John F. Due sebagai berikut (Mar'ie Muhammad, 1989) :

1. Pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Pajak dapat digunakan untuk mendorong atau merangsang jenis-jenis investasi yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan dalam bidang perpajakan. Misalnya: pemerintah memberikan *tax holiday* kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah Indonesia bagian timur. Sebaliknya pajak pun dapat digunakan untuk membatasi jenis-jenis investasi yang hanya memberikan sumbangan yang kecil bagi pembangunan nasional.
3. Pajak dapat digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.
4. Pajak dapat digunakan untuk membatasi impor barang-barang mewah dan barang-barang lainnya yang merugikan masyarakat dengan cara pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tersebut. Sebaliknya pajak pun

dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan ekspor barang-barang dengan cara pengenaan tarif pajak yang rendah ataupun membebaskannya.

5. Pajak dapat mendorong pemanfaatan faktor produksi tanah secara lebih produktif. Misalnya, tanah-tanah dan juga bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di daerah-daerah yang strategis, ditinjau dari sudut ekonomi, dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang strategis.

### 2.1.3.3 Teori Kurva Laffer



Sumber : Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, *Economics, 15<sup>th</sup> Edition*. Hal. 133

**GAMBAR 2.2**  
**KURVA LAFFER**

Hubungan tarif pajak dengan penerimaan pajak pemerintah menurut Laffer berbentuk suatu garis parabola yang menjelaskan bahwa pada tingkat tarif pajak sebesar nol maka tak akan ada pajak yang ditarik sehingga tidak ada pendapatan

pajak pemerintah. Ketika tarif pajak berjalan naik dari titik nol diikuti oleh kenaikan pendapatan pajak pemerintah dimisalkan tarif pajak naik sebesar 25% dititik A, pendapatan pajak naik juga ikut naik dititik A sampai dengan suatu titik tertentu misalkan tarif pajak naik sebesar 50% di titik M, terjadi pendapatan pajak pemerintah yang maksimal karena terjadi efisiensi pajak dimana masyarakat menerima tingkat potongan pajak yang rendah sedangkan pemerintah juga menerima tingkat pendapatan pajaknya yang maksimal.

Apa yang terjadi tarif pajak dinaikkan melampaui titik M ? akan terjadi *The disincentive affect out weighs the revenue effect*. Ketika tarif pajak dinaikkan melewati titik M sampai pada titik B maka masyarakat mulai bekerja lebih sedikit, menabung lebih sedikit, dan mengalihkan aktifitasnya pada suatu aktifitas yang dinamakan *underground economy* artinya Penerimaan pajak pemerintah turun walaupun tarif pajak dinaikkan., sebaliknya jika tarif dikurangi dari B ke titik M maka pendapatan pajak pemerintah naik walaupun tarif pajak turun. Ketika tarif pajak mencapai 100% tak seorangpun yang mau bekerja sehingga tak ada pendapatan pajak pemerintah.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

D.M. Mithani dan Goh Soo Khoon dalam penelitiannya yang berjudul *Causality Between Government Expenditure and Revenue in Malaysia*, pada ASEAN Economic Buletin Vol 16, April 1999 melakukan pengujian mengenai hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah di negara Malaysia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah uji kointegrasi dan *error correction model*, yang bertujuan untuk melihat

hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel-variabelnya. Hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah memiliki signifikansi yang unik di negara-negara sedang berkembang dalam membuat keputusan penganggaran.

Pemerintah di negara berkembang biasanya menghadapi adanya *budget constraint* yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah harus membuat suatu keputusan di antara dua kemungkinan, yaitu menaikkan penerimaan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk menutupi defisit fiskal dan sebagai usaha untuk penyesuaian dalam operasi fiskalnya. Secara teori tidak ada pernyataan dari ahli-ahli ekonomi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan perpajakan. Mithani dan Goo Soo Khoon mencoba membuat 3 alternatif hipotesis mengenai hubungan antara penerimaan perpajakan dengan pengeluaran pemerintah, yaitu *spend and tax hypothesis*, *tax and spend hypothesis* dan *fiscal synchronization hypothesis*.

Menurut *spend and tax hypothesis*, pemerintah memulai dengan menentukan pengeluaran lalu kemudian menentukan bagaimana cara membiayai pengeluaran, diikuti oleh tambahan besarnya penerimaan perpajakan pada tahun sebelumnya, jadi kausalitas bergerak dari pengeluaran ke penerimaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Wiseman dan Peacock (1967) yang menyatakan bahwa pada saat terjadi *external shock*, seperti depresi besar, dan perang dunia, dimana terjadi kenaikan besarnya pengeluaran pemerintah dapat memacu adanya kenaikan dalam penerimaan perpajakan. Pada penelitian Barrow (2001) menyatakan bahwa penerimaan perpajakan menyesuaikan adanya

## BAB 2

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Konsep dan Kebijakan Anggaran

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam 1 (satu) tahun (Suparmoko, 1986:49). Berdasarkan pengertian tersebut, anggaran digunakan untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan antara besarnya penerimaan terhadap besarnya pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian anggaran merupakan refleksi dari kebijakan pemerintah. Anggaran bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh usaha pembangunan itu.

Pada hakekatnya anggaran mengandung sisi pengeluaran dan penerimaan, di mana sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan dana dalam pelaksanaannya. Pada sisi ini terdiri atas 2 (dua) pos utama, yaitu pengeluaran rutin, misalnya: belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan bunga dan hutang, dan pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek pemerintah. Sedangkan pada sisi penerimaan dapat dilihat sumber-sumber penerimaan apa saja yang diharapkan oleh pemerintah untuk

perubahan-perubahan dalam pengeluaran pemerintah, seperti proposisi *Ricardian Equivalence* yang menyatakan bahwa kenaikan pajak adalah sebagai hasil dari tingginya pengeluaran fiskal sehingga kausalitas bergerak dari pengeluaran ke penerimaan.

Hipotesis selanjutnya yaitu *tax and spend hypothesis* menyatakan hubungan sebaliknya. Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa perubahan dalam besarnya penerimaan perpajakan akan diikuti oleh adanya perubahan pada besarnya pengeluaran pemerintah. Hipotesis ini didapat dari proposisi ahli-ahli ekonomi sisi penawaran (*supply side economist*) seperti Milton Friedman (1982) yang menyatakan bahwa kenaikan pada perpajakan hanya mengakibatkan kenaikan pada pengeluaran pemerintah dan bukan pengurangan dalam defisit. Pandangan ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas dari penerimaan pemerintah ke pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya hipotesis yang terakhir adalah *Fiscal synchronization hypothesis*, yang menyatakan bahwa pemerintah merubah pengeluaran dan penerimaan secara simultan. Pemerintah memutuskan tingkat pengeluaran dan penerimaan perpajakan pada suatu tingkat tertentu, dengan membandingkan keuntungan marginal dan biaya terhadap perubahan dalam keseimbangan anggaran. Berdasarkan penelitian D.M. Mithani dan Goh Soo Khoon diperoleh estimasi bahwa hasil uji kointegrasi menolak adanya hubungan jangka panjang antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah di Malaysia pada frekuensi nol, namun terdapat kointegrasi pada frekuensi bianual. Berdasarkan *error correction model*, D.M. Mithani dan Goh Soo Khoon menemukan bahwa

hanya penerimaan pemerintah yang merespon terhadap ketidak seimbangan anggaran dan adanya hubungan kausalitas dari pengeluaran pemerintah ke penerimaan pemerintah. Hasil ini sesuai dengan *spend tax hypothesis*, di mana pengeluaran pemerintah memicu adanya perubahan pada penerimaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa sektor publik Malaysia paling besar ditentukan oleh kebijakan pengeluaran atau belanja, sedangkan usaha lainnya untuk mengurangi peranan pemerintah harus diupayakan melalui pengurangan pengeluaran atau belanja, bukan pada pengumpulan pajak.

Berdasarkan penelitian D.M. Mithani dan Goh Soo Khooon tersebut, dengan model dan teknik analisis yang sama, skripsi ini akan mencoba untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan perpajakan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ruang lingkup penelitian, data yang digunakan dan dalam skripsi ini tidak menggunakan *error correction model (ECM)*. Di mana ruang lingkup penelitian ini adalah Indonesia dengan menggunakan data pengeluaran pemerintah dan penerimaan perpajakan Indonesia periode tahun anggaran 1969/1970 – 2006

## **2.3 Hipotesis dan Model Analisis**

### **2.3.1 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diduga terdapat hubungan interdependensi yang kuat antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak di Indonesia.

### 2.3.2 Model Analisis

Pertimbangan teoritis dalam menyusun model VAR yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bahwa hubungan interdependensi antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah non-struktural, serta hasil-hasil empirik penelitian sebelumnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik model VAR yaitu bersifat non-struktural sehingga dapat mengidentifikasi efek kebijakan tanpa menggunakan model struktural yang lengkap. Dari hasil estimasi VAR sendiri melalui properti VAR yaitu *causality*, *impulse response* dan *varian decomposition* akan dapat dijelaskan bagaimana hubungan interdependensi antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Model yang digunakan adalah model standar VAR. Untuk mendapatkan model standar VAR terlebih dahulu dibangun model primitif VAR sebagai berikut:

$$\begin{aligned} GX_t &= \alpha_{10} + \alpha_{12}TX_{t-1} + \beta_{11}GX_{t-1} + \beta_{12}TX_{t-1} + \varepsilon_{GX_t} \\ TX_t &= \alpha_{20} + \alpha_{21}GX_{t-1} + \beta_{21}GX_{t-1} + \beta_{22}TX_{t-1} + \varepsilon_{TX_t} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2.6$$

Atau dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} GX_t \\ TX_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{10} \\ \alpha_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} GX_{t-1} \\ TX_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{GX_t} \\ \varepsilon_{TX_t} \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2.7$$

$$\text{atau} \quad Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1x_{t-1} + \varepsilon_t \quad \dots\dots\dots 2.8$$

$$\text{dimana: } B = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & 1 \end{bmatrix}, \quad x_t = \begin{bmatrix} GX_t \\ TX_t \end{bmatrix}, \quad \Gamma_0 = \begin{bmatrix} \alpha_{10} \\ \alpha_{20} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{GX_t} \\ \varepsilon_{TX_t} \end{bmatrix}$$

Dengan mengalikan persamaan (2.8) terhadap inverse matriks B ( $B^{-1}$ ), diperoleh persamaan VAR dalam bentuk standar sebagai berikut :

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + \lambda_t \quad \dots\dots\dots 2.9$$

$$A_0 = B^{-1} \Gamma_0$$

dimana:  $A_1 = B^{-1} \Gamma_1$

$$\lambda_t = B^{-1} \varepsilon_t$$

Sehingga jika  $a_{i0}$  didefinisikan sebagai elemen  $i$  dari vektor  $A_0$ ,  $a_{ij}$  sebagai elemen baris  $i$  dan kolom  $j$  dari matriks  $A_1$ , dan  $e_{it}$  sebagai elemen  $i$  dari vektor  $e_t$ , maka dengan menggunakan notasi baru persamaan (2.6) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} GX_t &= \alpha_{10} + \alpha_{11} GX_{t-1} + \alpha_{12} TX_{t-1} + \varepsilon_{GX_t} \\ TX_t &= \alpha_{20} + \alpha_{21} GX_{t-1} + \alpha_{22} TX_{t-1} + \varepsilon_{TX_t} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2.10$$

dimana  $\varepsilon_{GX_t}, \varepsilon_{TX_t}$  dan adalah proses *white noise* (independen terhadap perilaku historis  $GX$  dan  $TX$ ). Dengan  $n$  lag dalam model standar VAR tersebut maka model akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} GX_t &= \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \alpha_1 GX_{t-i} + \sum_{i=1}^n \alpha_2 TX_{t-i} + \varepsilon_{GX_t} \\ TX_t &= \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_1 TX_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_2 GX_{t-i} + \varepsilon_{TX_t} \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2.11$$

Dimana :

$GX_t$  = Pengeluaran pemerintah

$TX_t$  = Penerimaan pajak

$\alpha_0, \beta_0, \delta_0, \delta_0$	= <i>Intersep</i>
$\alpha_k, \beta_k, \delta_k, \delta_k$	= <i>Koefisien Parameter</i>
$GX_{t-1}, TX_{t-1}$	= <i>Lag operator</i>
$\varepsilon_{SBI_t}, \varepsilon_{PUAB_t}, \varepsilon_{YGAP_t}, \varepsilon_{INF_t}$	= <i>Error terms</i>

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan dalam bentuk perhitungan formulasi matematis yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis. Selain itu juga dilakukan studi literatur mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, khususnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 3.2 Identifikasi Variabel

Bentuk dasar model VAR memperlakukan seluruh variable secara simetris tanpa membedakan variable dependent dan variable independe. Artinya, seluruh variable diperlakukan secara endogen.

Variabel-variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pengeluaran pemerintah ( $G_X$ ) dan penerimaan pajak ( $T_X$ ).

#### 3.3 Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kerancuan makna dari variabel-variabel yang digunakan dalam model analisis, maka berikut ini diberikan definisi operasional yang merupakan batasan dan penjelasan dari beberapa variabel yang digunakan,

sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah pada pokok permasalahannya, yang meliputi :

- a. Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini realisasi pengeluaran pemerintah tiap tahun anggaran. Data yang digunakan adalah data tahunan.
- b. Penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak tiap tahun anggaran. Data yang digunakan adalah data tahunan

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan yang berbentuk deret waktu (*time series*), dengan periode tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan tahun anggaran 2006. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

### **3.5 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain :

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku pustaka, jurnal ekonomi dan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan masukan terutama untuk analisis dan pembahasan
3. Data *Internet Service*, yang telah diolah kembali oleh peneliti.

### 3.6 Teknik Analisis

#### 3.6.1 Uji Prasyarat

##### 3.6.1.1 Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi

Analisis jangka panjang dan jangka pendek hubungan antar variabel ekonomi, biasanya melibatkan data runtun waktu. Karakteristik data ekonomi dan keuangan biasanya diasosiasikan dengan runtun waktu yang non-stasioner yang disebut dengan *trend*, sedangkan karakteristik data ekonomi dan keuangan jangka pendek biasanya diasosiasikan dengan data runtun waktu yang stasioner yang disebut siklus (*cycles*). Data ekonomi dan keuangan runtun waktu dapat juga mengandung kedua komponen tersebut yaitu, siklus dan *trend*. Goncangan (*shock*) terhadap data runtun waktu yang stasioner akan mempunyai dampak yang secara bertahap akan menghilang, tanpa meninggalkan dampak permanen terhadap runtun waktu tersebut kedepan. Sedangkan goncangan terhadap data runtun waktu yang tidak stasioner secara permanen akan merubah pola runtun waktu, dan secara permanen akan menggeser aktifitas ekonomi tersebut pada level keseimbangan yang berbeda, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari keseimbangan sebelumnya. (Thomas, 1997:370)

Selanjutnya jika terdapat dua atau lebih data runtun waktu, kombinasi dua data runtun waktu tersebut dapat memiliki bentuk dampak bersama dari kombinasi tersebut yang tidak dimiliki oleh data runtun waktu secara individual. Misalnya kombinasi dua data runtun waktu dapat memiliki *trend* bersama (*trend shared*) dari dua kombinasi tersebut. Jika hal ini terjadi dan secara individual data tersebut tidak lagi mengandung *trend*, maka dikatakan dua data runtun waktu

tersebut berkointegrasi. Hal ini juga bisa terjadi terhadap kombinasi data runtun waktu yang stasioner secara individual, dua kombinasi data runtun waktu tersebut dikatakan mengandung siklus bersama.

Oleh karena itu salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam estimasi model ekonomi dengan data runtun waktu adalah dengan menguji apakah data runtun waktu tersebut stasioner atau tidak. Data yang stasioner adalah data yang tidak mengandung akar-akar unit (*unit roots*), sebaliknya data yang tidak stasioner adalah data yang mengandung akar-akar unit (*unit roots*). Data runtun waktu dikatakan stasioner jika *mean*, *variance*, dan *covariance* data tersebut konstan sepanjang waktu. (Thomas, 1997:374). Dengan demikian data runtun waktu dikatakan stasioner jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.  $E(X_t) = \text{konstan}$ , untuk semua  $t$
2.  $\text{Var}(X_t) = \text{konstan}$ , untuk semua  $t$
3.  $\text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \text{konstan}$ , untuk semua  $t$

Uji akar-akar unit pada penelitian ini menggunakan uji *Dickey-Fuller (DF)* dan *Augmented Dickey-Fuller (ADF)* (Thomas, 1997:405-409). Misalnya terdapat persamaan *first order autoregressive* sebagai berikut:

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \varepsilon_t \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (3.1)$$

Jika kedua sisi persamaan (3.1) dikurangi dengan  $y_{t-1}$ , maka persamaan (3.1) menjadi sebagai berikut:

$$\Delta y_t = \alpha + (\rho - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t = \alpha + \theta y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

dimana  $\theta = (\rho - 1)$

Uji *Dickey-Fuller* dilakukan dengan menghitung nilai  $t$  statistik yang dihitung dengan rumus:

$$t = \frac{\hat{\rho}}{Se \hat{\rho}} \quad (3.3)$$

Dengan hipotesis bahwa persamaan (3.3) mengandung akar-akar unit di dalam  $y_t$ , atau  $H_0 : \theta = 0$ , dan  $H_a : \theta < 0$

Kemudian nilai  $t$  statistik yang diperoleh dibandingkan dengan  $t$  *Mc Kinnon Critical Values*. Jika  $t$  hitung  $> t$  tabel,  $H_0$  tidak ditolak, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa di dalam persamaan mengandung akar-akar unit, artinya data tidak stasioner. Sebaliknya jika  $t$  hitung  $< t$  tabel,  $H_0$  ditolak, cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa di dalam persamaan mengandung akar-akar unit, artinya data stasioner.

Persamaan (3.1) dan (3.2) merupakan bentuk sederhana dengan asumsi residual bersifat *white noise*. Secara umum korelasi serial antara residual dengan  $\Delta y_t$  dapat dinyatakan dalam bentuk umum proses *autoregressive* sebagai berikut:

$$\Delta y_t = \alpha + \theta y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.4)$$

Dalam persamaan (3.4) dapat pula ditambahkan *trend* deterministik dengan atau tanpa intersep. Dengan dasar persamaan (3.4) tersebut prosedur uji *Dickey Fuller* menjadi uji *Augmented Dickey Fuller*.

Jika dari hasil uji stasioneritas berdasarkan uji *DF* dan/atau uji *ADF* diperoleh data seluruh variabel yang belum stasioner pada level, atau integrasi derajat nol,  $I(0)$ , syarat stasioneritas model ekonomi data runtun waktu dapat

diperoleh dengan cara *differencing* data, yaitu dengan mengurangi data tersebut dengan data periode sebelumnya. Dengan demikian melalui *differencing* pertama (*first difference*) diperoleh data selisih atau delta ( $\Delta$ )-nya. Prosedur uji DF dan/atau ADF kemudian diaplikasikan kembali untuk menguji data *first difference*. Jika dari hasil uji ternyata data *first difference* telah stasioner, maka dikatakan data runtun waktu tersebut dikatakan terintegrasi pada derajat pertama I(1) untuk seluruh variabel. Tetapi, jika data *first difference* tersebut belum stasioner maka perlu dilakukan *differencing* kedua pada data tersebut, prosedur uji DF dan/atau ADF kemudian diaplikasikan kembali pada data *second difference*. Prosedur ini seterusnya dilakukan hingga diperoleh data yang stasioner sehingga akan diketahui derajat integrasi dari data pada seluruh variabel yang digunakan.

### 3.6.1.2 Uji Kausalitas

Karena sifat model VAR yang non-struktural, maka terlebih dahulu harus dianalisis apakah memang ada hubungan yang saling mempengaruhi (interdependensi) antar variabel endogen yang diamati, sehingga spesifikasi model VAR tepat digunakan dalam analisis lebih jauh. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang diamati adalah uji kausalitas Granger.

Misalnya terdapat dua variabel endogen yaitu inflasi (I) dan penawaran uang (M1). Untuk menguji apakah inflasi (I) dipengaruhi oleh penawaran uang (M1), langkah pertama adalah menguji hipotesis nol bahwa "M1 tidak berpengaruh terhadap I" dengan melakukan dua regresi sebagai berikut:

Regresi yang tidak terkendala (*unrestricted regression*):

$$I = \sum_{i=1}^m \alpha_i I_{t-i} + \sum_{i=1}^m M1_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.7)$$

Regresi yang terkendala (*restricted regression*)

$$I = \sum_{i=1}^m \alpha_i I_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.8)$$

*F test* dihitung dengan metode:

$$F = (N - k) \frac{(ESS_R - ESS_{UR})}{q(ESS_{UR})} \quad (3.9)$$

Dimana *ESS* adalah *Residual Sum Square*, *N* adalah jumlah observasi, *k* adalah jumlah parameter estimasi dalam regresi yang *unrestricted*, dan *q* adalah jumlah parameter dalam regresi *restricted*.

Jika *F* hitung > *F* tabel, maka hipotesis nol ditolak, artinya bahwa penawaran uang (M1) berpengaruh terhadap inflasi (I). Untuk menguji kausalitas sebaliknya, maka prosedur uji dilakukan dengan metode yang sama, tetapi dengan membalik variabel dalam persamaan regresi di atas.

### 3.6.1.3 Penetapan *Lag* Optimal

Salah satu kesulitan menggunakan VAR adalah menetapkan *lag* yang optimal. Beberapa penelitian mutakhir metode VAR, untuk menetapkan tingkat kelambanan yang optimal dapat menggunakan kriteria informasi yakni *Akaike Information Criteria* (AIC) dan *Schwartz Criteria* (SC). Pada mulanya AIC dan SC dipergunakan sebagai alternatif uji *goodness of fit* atau pengganti  $R^2$  (*coefficient of determination*) sehingga  $R^2$  bukanlah satu-satunya indikator validitas sebuah model ekonometri (Thomas, 1997:181-182) dan (Greene, 2000:306). Perkembangan berikutnya AIC dan SC dapat digunakan untuk menetapkan tingkat kelambanan yang optimal (Greene, 2000:717).

$$AIC(q) = \text{Log}(e'e) / T + 2q/T \quad (3.5)$$

$$SC(q) = AIC(q) + (q/T)(\log T - 1) \quad (3.6)$$

Dari persamaan (3.5) dan (3.6) terlihat beberapa notasi seperti  $e$  adalah residual, sedangkan  $T$  merupakan jumlah sampel dan  $q$  adalah jumlah variabel yang beroperasi pada persamaan itu. Dalam menetapkan tingkat kelambanan yang paling optimal, model VAR harus diestimasi hingga *lag* yang memungkinkan untuk dimasukkan, kemudian dibandingkan nilai *AIC* dan *SC*-nya. Penetapan tingkat kelambanan optimal didasarkan atas nilai yang paling rendah dari *AIC* dan *SC*.

### 3.6.2. Metode *Vector Autoregression (VAR)*

Teori ekonomi menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi yang diamati. Dengan landasan teori ekonomi tersebut, konstruksi model ekonometri dibentuk. Karena umumnya variabel-variabel ekonomi saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, secara struktural model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel ekonomi adalah model persamaan simultan (*simultaneous model*).

Dinamika perkembangan variabel-variabel ekonomi juga bisa diamati dari perspektif antar waktu dimana fluktuasi dan dinamika variabel-variabel tersebut naik turun secara siklikal, *seasonal*, karena pengaruh *trend* waktu, maupun karena adanya guncangan (*shock*). Model-model struktural yang digunakan untuk menjelaskan dinamika variabel-variabel ekonomi tersebut dalam hubungannya dengan runtun waktu adalah model-model dinamis (*dynamic model*). Oleh karena

itu untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel-variabel ekonomi secara simultan dan sekaligus menangkap penjelasan atas dinamika variabel-variabel ekonomi tersebut, model struktural yang digunakan adalah model persamaan simultan dinamis (*dynamic simultaneous model*).

Namun sayangnya seringkali teori ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan spesifikasi hubungan antar variabel yang dikonstruksikan dalam persamaan simultan dinamis. Terlebih lagi estimasi dan statistik inferensi menjadi sulit dilakukan ketika spesifikasi model ekonometri melibatkan variabel-variabel endogen baik di sisi kiri persamaan maupun sisi kanan persamaan. Kesulitan ini menyebabkan munculnya alternatif untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel di dalam model non-struktural. Salah satu model non-struktural yang biasa digunakan adalah model *vector autoregression (VAR)* dan *vector error correction (VEC)*.

Metode VAR menganggap bahwa semua variabel adalah endogen. Dalam kasus dua variabel ( $y_t$ ) dan ( $z_t$ ); nilai sekarang ( $y_t$ ) dipengaruhi oleh nilai sekarang dan nilai masa lalu ( $z_t$ ) dan nilai sekarang ( $z_t$ ) dipengaruhi oleh nilai sekarang dan nilai masa lalu ( $y_t$ ). Secara sederhana, sistem bivariat tersebut dapat ditulis sebagai berikut (Enders:2000):

$$\begin{aligned} y_t &= b_{10} - b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{y_t} \\ z_t &= b_{20} - b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{z_t} \end{aligned} \quad (3.10)$$

Persamaan (3.6) disebut sebagai *first order / primitive VAR*, dimana diasumsikan: (1)  $y_t$  dan  $z_t$  adalah stasioner; (2)  $\varepsilon_{y_t}$  dan  $\varepsilon_{z_t}$  adalah proses *white noise* dengan standar deviasi  $\sigma_y$  dan  $\sigma_z$ ; dan (3)  $\varepsilon_{y_t}$  dan  $\varepsilon_{z_t}$  tidak saling berkorelasi. Persamaan (3.6) dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

$$\text{atau } Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.12)$$

$$\text{dimana } B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix}, \quad x_t = \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix}, \quad \Gamma_0 = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

Dengan mengalikan persamaan (3.8) terhadap inverse matriks B ( $B^{-1}$ ), diperoleh persamaan VAR dalam bentuk standar sebagai berikut:

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + \lambda_t \quad (3.13)$$

$$A_0 = B^{-1} \Gamma_0$$

$$\text{dimana: } A_1 = B^{-1} \Gamma_1$$

$$\lambda_t = B^{-1} \varepsilon_t$$

Sehingga jika  $a_{i0}$  didefinisikan sebagai elemen  $i$  dari vektor  $A_0$ ,  $a_{ij}$  sebagai elemen baris  $i$  dan kolom  $j$  dari matriks  $A_1$ , dan  $e_{it}$  sebagai elemen  $i$  dari vektor  $e_t$ , maka dengan menggunakan notasi baru persamaan (3.9) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} y_t &= a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t} \\ z_t &= a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t} \end{aligned} \quad (3.14)$$

Dari persamaan dasar tersebut dapat diturunkan dua macam bentuk estimasi yakni, responsi terhadap adanya inovasi (*impulse response*) dan dekomposisi varian (*varian decomposition*).

### 3.6.2.1 Responsi Terhadap Adanya Inovasi (*Impulse Response*)

Responsi terhadap adanya inovasi merupakan salah satu metode pada VAR yang digunakan untuk melihat responsi variabel endogen terhadap adanya pengaruh inovasi (*shock*) variabel endogen yang lain (Pindycks dan Rubinfeld, 1991:385) dan (Greene, 2000:744-746). Secara statistik responsi terhadap adanya aksi dirumuskan oleh Sims (1980b,256-257), sebagai sebuah model linier vektor stokastik  $x$  yang diformulasikan sebagai berikut :

$$X_t = \sum_{s=0}^{\infty} A_s e_{t-s} \quad (3.15)$$

Di mana  $e_t = x_t - E(x_t | x_{t-1}, x_{t-2}, \dots)$ , kemudian memilih matriks triangular  $B$ , sehingga menghasilkan  $Be_t$  yakni sebuah kovarian diagonal matriks dan  $B$  juga mempunyai diagonalnya sendiri, oleh karena itu  $A$  perlu dipindah menjadi  $C = AB'$  dan  $e$  menjadi  $f = Be$ , sehingga menjadi :

$$X_t = \sum_{s=0}^{\infty} C_s f_{t-s} \quad (3.16)$$

Dari persamaan (3.12) koefisien  $C$  adalah responsi terhadap adanya aksi atau inovasi (*response to innovations*).

## 3.6.3 Uji Statistik

### 3.6.3.1 Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur sumbangan variabel bebas terhadap variabel tergantung, semakin tinggi nilai  $R^2$  suatu regresi atau semakin mendekati nilai satu regresi tersebut semakin baik. Ada dua sifat yang dapat dicatat dari  $R^2$ , yaitu  $R^2$  merupakan besaran non-negatif dan mempunyai range antara nol sampai satu. Suatu  $R^2$  bernilai satu berarti suatu kecocokan yang

sempurna. Sedangkan  $R^2$  yang bernilai nol berarti tidak ada kecocokan hubungan antara variabel tidak bebas dan variabel tidak bebas. Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam model regresi klasik antara lain :

1. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu nol, yaitu  $E(\epsilon) = 0$ , untuk  $I = 1, 2, 3, \dots, n$
2. Varian  $(\epsilon) = E(\epsilon^2) = \sigma^2$ , sama untuk semua kesalahan pengganggu (asumsi homoskedastisitas)
3. Tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu, berarti kovarian  $(\epsilon) = 0$

Variabel bebas  $X_1, X_2, \dots, X_k$ , konstan dalam sampling yang terulang dan bebas terhadap kesalahan pengganggu.

4. Tidak ada kolinieritas ganda (multikolinieritas) di antara variabel bebas  $X$ .

$(\epsilon) \sim N(0 : \sigma^2)$ , artinya kesalahan pengganggu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dan kovarian  $\sigma^2$ .

### 3.6.3.2 Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas signifikan terhadap variabel tergantung secara individual, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut :

- a.  $H_0 : \beta_0 = 0$  berarti variabel  $X_i$  tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantungnya.
- b.  $H_a : \beta_i \neq 0$  : berarti variabel  $X_i$  mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantungnya.
- c. Uji t dihitung dengan rumus:

$$t = \beta_i / s \beta_i$$

Dimana :

$t$  = nilai  $t$

$\beta_i$  = koefisien regresi  $X_i$

$s_{\beta_i}$  = Standar Deviasi dari Koefisien Regresi  $X_i$

d. Menentukan  $t$  tabel dengan tingkat kepercayaan 5 % ( $\alpha = 0,05$ ) dengan

rumus:

$t_{\text{tabel}} = \alpha / 2 ; N-k-1$ , dimana

$\alpha$  = Tingkat signifikan

$N$  = Banyaknya observasi

$K$  = Banyaknya Variabel bebas

e. Menentukan kriteria uji  $t$  adalah :

Bila  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak, berarti variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat.

### 3.6.3.3 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji regresi secara keseluruhan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantungnya. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung,

$H_0 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung.

b. Uji F dihitung dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) - (N-k-1)}$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

K = Banyaknya variabel bebas

N = Banyaknya observasi

c. Menentukan F tabel dengan rumus :

$$F_{\text{tabel}} = \alpha(k) (N-k-1)$$

Dimana :

$\alpha$  = Tingkat signifikan

k = banyaknya variabel bebas

N = Banyaknya observasi

d. Menentukan kriteria uji F, yaitu :

Bila  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung. Bila  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ , artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

##### **4.1.1. Variabel Penerimaan Pajak**

Secara konseptual pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana atau penerimaan, serta mewujudkan fungsi distribusi dan alokasi yang dilakukan pemerintah. Dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya perbaikan baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi pembenahan SDM. Dimulai tahun 1984 dan kemudian disempurnakan lagi tahun 1994 atas Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang penerimaan pajak antara lain dengan intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subyek pajak, yaitu dengan upaya menjaring wajib pajak baru, memperluas objek pajak, serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Kebijakan jangka panjang antara lain berupa program pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, berupa pemberian berbagai fasilitas perpajakan baik dalam rangka pengembangan sektor-sektor ekonomi dan kawasan-kawasan ekonomi tertentu maupun dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

**TABEL 4.1**  
**REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN PEMERINTAH**  
**TAHUN ANGGARAN 1981/1982 – 2006**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun Anggaran	Pajak Penghasilan	Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Bea Masuk	Cukai	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Ekspor	Pajak Lainnya
1981/1982	961	634	630	544	94	128	211
1982/1983	1.062	867	696	670	105	96	275
1983/1984	1.455	930	672	823	142	144	338
1984/1985	2.121	878	530	872	157	91	145
1985/1986	2.213	2.176	607	943	167	50	174
1986/1987	2.707	2.900	1.010	1.156	290	229	190
1987/1988	3.265	3.590	1.138	1.206	325	184	223
1988/1989	4.186	4.505	1.342	1.420	424	176	292
1989/1990	5.488	5.837	1.845	1.677	690	272	275
1990/1991	7.947	8.218	2.686	1.862	861	194	243
1991/1992	9.727	9.146	2.871	1.915	944	17	299
1992/1993	12.516	10.742	3.223	2.242	1.107	9	253
1993/1994	14.759	13.944	3.555	2.626	1.484	14	283
1994/1995	18.350	14.087	3.218	3.001	1.632	120	303
1995/1996	20.520	18.350	3.248	3.668	1.924	201	510
1996/1997	27.062	20.351	2.579	4.263	2.413	81	591
1997/1998	34.388	25.199	2.999	5.101	2.641	129	478
1998/1999	49.297	28.386	2.218	7.974	3.163	4.582	462
1999/2000	72.641	33.082	4.058	10.426	4.083	875	606
2000	57.053	35.249	6.695	11.286	4.546	326	872
2001	92.876	55.817	9.842	17.537	6.384	759	1.726
2002	72.245	40.991	6.712	12.879	4.928	962	1.056
2003	74.058	44.019	7.750	13.901	5.286	682	1.218
2004	79.726	46.942	8.101	14.772	5.533	801	1.333
2005	75.343	43.984	7.521	13.850	5.249	815	1.202
2006	76.376	44.982	7.790	14.174	5.356	766	1.251

Sumber : Departemen Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN* dan Bank Indonesia. *Statistik Keuangan Indonesia*. Beberapa edisi. Data diolah kembali.

Dalam Tabel 4.1 dapat terlihat keberhasilan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah. Adanya peningkatan jumlah penerimaan perpajakan pemerintah dari tahun ke tahun. Pada periode tahun anggaran 1985/1986, penerimaan perpajakan sebesar 6.330 miliar rupiah. Setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan terjadi kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 32 % bila dibandingkan penerimaan perpajakan periode sebelumnya tahun anggaran 1984/1985 sebesar 4.794 milyar rupiah. Pada periode tersebut kenaikan terbesar pada pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan tahun 1994, penerimaan perpajakan pemerintah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18,04 persen tiap tahunnya. Ini disebabkan pemerintah lebih meningkatkan mutu pelayanannya lebih mudah dan efisien, serta mampu memperluas wajib pajak baru. Dan ini terlihat pada jenis pajak yang terbesar menyumbang penerimaan perpajakan pemerintah adalah pajak penghasilan di mana rata-rata sebesar 23,18 persen tiap tahunnya.

Pada periode tahun anggaran 1998/1999 setelah terjadinya krisis moneter, sektor penerimaan perpajakan tidak terpengaruh dalam menyumbangkan penerimaan kepada pemerintah. Sebab terjadi lonjakan penerimaan perpajakan yang cukup besar pada jenis pajak ekspor, dimana mengalami lonjakan sebesar 3500 persen dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, dimana 1 dollar pernah mencapai Rp 14.000,- sehingga disatu sisi menguntungkan negara Indonesia, sebab barang dari

Indonesia dapat laku dipasaran Internasional tetapi juga mengakibatkan meningkatnya utang luar negeri Indonesia.

Pada periode tahun anggaran 2000, terjadi penurunan penerimaan perpajakan disebabkan karena perpindahan periode tahun anggaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dimana sebelumnya menggunakan tahun fiskal yaitu mulai 1 April sampai 31 Maret, maka mulai tahun 2000 diganti menggunakan tahun kalender yang berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga pada periode tahun anggaran 2000 hanya terdapat 9 bulan.

#### **4.1.2. Variabel Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kebijakan pemerintah berupa pengeluaran rutin didasarkan atas prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, sedangkan kebijakan pemerintah berupa pengeluaran pembangunan didasarkan atas prinsip lebih mengutamakan belanja pembangunan untuk sektor-sektor strategis dan mempunyai dampak pengganda yang besar bagi perekonomian nasional.

Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dilaksanakan sejak tahun pertama Repelita I, didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Berimbang dalam arti jumlah keseluruhan pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan selalu sama dengan jumlah penerimaan negara. Dinamis berarti bahwa dalam hal penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula,

pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan. Namun sejak periode tahun anggaran 2000 terjadi perubahan format APBN. APBN yang sebelumnya disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, diubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri.

Penerapan anggaran belanja negara, khususnya pengeluaran rutin diusahakan senantiasa mengacu kepada dua sasaran utama, yaitu menunjang kelancaran roda pemerintah serta mendukung usaha peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk menunjang kelancaran roda pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerataan serta kewajiban negara terhadap luar negeri, telah dilakukan berbagai usaha penghematan dengan menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan, pemerintah memprioritaskan kepada sektor-sektor yang menyediakan berbagai infrastruktur ekonomi, seperti transportasi, energi, pengairan dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh investor, terutama untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas dibidang ekonomi. Ditinjau dari jumlah dan strategi alokasinya pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh terhadap arah pembangunan diberbagai bidang seperti produksi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan dan kesetabilan nasional.

periode tahun anggaran 2000, terjadi penurunan penerimaan perpajakan disebabkan karena perpindahan periode tahun anggaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN). Dimana sebelumnya menggunakan tahun fiskal yaitu mulai 1 April sampai 31 Maret, maka mulai tahun 2000 diganti menggunakan tahun kalender yang berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga pada periode tahun anggaran 2000 hanya terdapat 9 bulan.

Realisasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan periode tahun anggaran 1981/1982 – 2001 terdapat pada Tabel 4.2. Secara umum tampak bahwa total pengeluaran pemerintah periode tahun anggaran 1981/1982 – 2001 mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa setelah periode tahun anggaran 1984/1985 atau mulai periode tahun anggaran 1985/1986 sampai periode tahun anggaran 2001, pengeluaran rutin mendominasi pengeluaran pemerintah karena nilainya selalu lebih besar daripada pengeluaran pembangunan. Pelaksanaan pengeluaran rutin diarahkan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang bersifat terus-menerus, memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pihak-pihak di dalam negeri dan diluar negeri yang telah memberikan pinjaman serta pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah lainnya.

**TABEL 4.2**  
**REALISASI PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN**  
**PEMBANGUNAN TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH TAHUN**  
**1981 / 1982 – 2006**

Tahun	Pengeluaran Rutin (Milyar Rp)	%	Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rp)	%
1981/1982	6.997,6	50,13	6.940,1	49,87
1982/1983	6.996,3	48,73	7.359,6	51,27
1983/1984	8.411,8	45,94	9.899,2	54,06
1984/1985	9.429,0	48,65	9.951,9	51,35
1985/1986	11.951,5	52,36	10.873,0	47,64
1986/1987	13.559,3	61,94	8.332,0	38,06
1987/1988	17.481,5	64,85	9.477,4	35,15
1988/1989	20.739,0	62,87	12.250,7	37,13
1989/1990	24.335,0	61,25	15.394,0	38,75
1990/1991	29.121,0	61,47	18.251,0	38,53
1991/1992	29.053,0	55,73	23.075,0	44,27
1992/1993	33.605,0	55,54	26.906,0	44,46
1993/1994	40.290,0	58,63	28.429,0	41,37
1994/1995	44.069,0	58,95	30.692,0	41,05
1995/1996	50.435,0	63,67	28.781,0	36,33
1996/1997	62.561,0	63,51	35.952,0	36,49
1997/1998	89.610,0	70,02	38.359,0	29,98
1998/1999	147.717,0	68,52	67.869,0	31,48
1999/2000	166.881,0	68,06	78.311,0	31,94
2000	164.087,0	85,08	28.769,0	14,92
2001	211.388,0	82,30	45.461,0	17,70
2002	179.188,0	78,16	49.976,0	21,80
2003	184.887,0	81,69	41.402,0	18,29
2004	191.821,0	80,78	45.613,0	19,21
2005	185.299,0	80,21	45.664,0	19,77
2006	187.336,0	80,89	44.226,0	19,10

Sumber : Departemen keuangan RI, *Nota Keuangan APBN*. Bank Indonesia, *Statistik Keuangan Indonesia*. Beberapa edisi. Data diolah kembali

Pengeluaran rutin pemerintah Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. Di mana di dalamnya memberikan gambaran bahwa secara umum

pengeluaran rutin pemerintah Indonesia periode tahun anggaran 1981/1982 – 2006 tiap tahun anggarannya mengalami peningkatan.

**TABEL 4.3**  
**REALISASI PENGELUARAN RUTIN PEMERINTAH INDONESIA**  
**TAHUN 1981 / 1982 – 2006**  
**(MILIAR RUPIAH)**

Tahun Anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Bunga Dan Cicilan Hutang	Subsidi Daerah Otonom	Lain-lain
1981/1982	2.271	922	931	1.209	1.637
1982/1983	2.418	1.041	1.224	1.315	997
1983/1984	2.757	1.057	2.102	1.547	948
1984/1985	3.047	1.183	2.776	1.883	539
1985/1986	4.018	1.367	3.323	2.489	754
1986/1987	4.310	1.366	5.058	2.649	174
1987/1988	4.617	1.329	8205	2.815	515
1988/1989	4.998	1.492	10.940	3.038	271
1989/1990	6.205	1.704	11.924	3.577	925
1990/1991	7.088	1.842	12.816	3.888	3.487
1991/1992	8.170	2.328	12.838	4.376	1.341
1992/1993	9.554	2.928	14.524	5.383	1.216
1993/1994	11.145	3.032	17.163	6.909	2.041
1994/1995	12.595	4.319	18.402	7.273	1.480
1995/1996	13.001	5.175	22.109	8.227	1.923
1996/1997	14.455	8.109	27.491	9.358	3.149
1997/1998	17.269	8.999	31.112	11.061	21.169
1998/1999	24.480	11.058	55.798	14.194	42.187
1999/2000	33.623	10.862	39.994	19.170	63.232
2000	29.990	9.047	53.326	59.729	11.995
2001	38.206	9.909	89.570	64.269	9.434
2002	33.178	9.956	62.280	47.308	26.467
2003	33.791	9.637	68.392	57.102	15.965
2004	35.058	9.834	73.414	56.226	17.289
2005	34.009	9.809	68.029	53.545	19.907
2006	34.286	9.760	69.945	55.625	17.720

Sumber : Departemen keuangan RI, *Nota Keuangan APBN*. Bank Indonesia, *Statistik Keuangan Indonesia*. Beberapa edisi. Data diolah kembali

#### 4.1.3. Perkembangan Variabel Penelitian

Semenjak era Orde Baru (Pemerintahan Presiden Soeharto), anggaran untuk penerimaan serta pengeluaran Indonesia menganut prinsip keseimbangan. Konsekwensi dari hal itu adalah Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan pengeluaran negara dengan penerimaan.

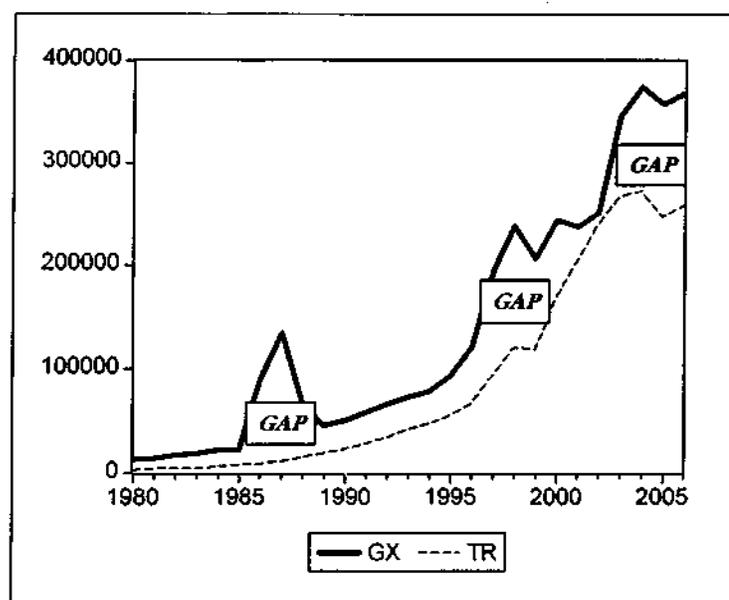
Paradigma tersebut berganti menjadi prinsip anggaran defisit, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan penerimaan sesuai rencana pengeluaran. *Gap* antara rencana pengeluaran dengan penerimaan ditutup oleh hutang.

Secara konsep, prinsip anggaran defisit lebih realistis dibandingkan dengan prinsip anggaran berimbang. Kelemahan prinsip tersebut adalah perilaku meminta hutang menjadi sebuah norma yang tidak tabu dalam penyusunan anggaran. Akibat jangka panjangnya adalah beban hutang yang bertambah.

Pada Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN), pembayaran beban hutang masuk ke dalam komponen pengeluaran pembangunan. Secara perlahan, beban hutang akan menjadi komponen pembayaran yang relatif besar bagi pendapatan sesungguhnya Pemerintah Indonesia.

Pendapatan Pemerintah sendiri berasal dari beberapa bagian, yaitu pajak serta penerimaan dari sektor MiGas dan Non MiGas. Sektor MiGas dan Non MiGas sendiri merupakan komponen pendapatan negara yang cenderung fluktuatif. Pajak sebagai salah satu bentuk partisipasi Warga Negara Indonesia dalam pembangunan Indonesia menjadi alternatif yang paling baik, karena stabilitas *trend* penerimaan pajak.

Dari tahun ke tahun, perkembangan variabel penerimaan pajak dengan variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pola pergerakan yang sama (cenderung meningkat). Selama kurun waktu 26 tahun (1980 – 2006) terjadi rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 21,64%, sedangkan rata-rata pengeluaran pemerintah selama kurun waktu tersebut sebesar 24,59%. Secara lebih terperinci, dalam kurun waktu 5 tahunan penerimaan pajak mengalami rata-rata pertumbuhan yang naik turun (1980-1984: 18,42%; 1985-1989: 24,96%; 1990-1994: 20,71%; 1995-1999: 20,77%; 2000-2004: 22,97%; 2005-2006: 4,36%). Selama kurun waktu 5 tahunan, pengeluaran pemerintah mempunyai pola pergerakan yang berbeda dari penerimaan pajak. Pada periode 5 tahun yang pertama (1980-1984) rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 14,06%. Selanjutnya nilai rata-rata pertumbuhan tersebut bertambah secara drastis menjadi sebesar 54,84% (1985-1989). Pada periode 5 tahun yang ketiga (1990-1994), nilai tersebut turun menjadi 11,47%. Kemudian secara berturut-turut rata-rata pertumbuhan tersebut naik menjadi 23,73% (1995-1999) dan turun menjadi 13,72% (2000-2006).



Sumber: Data Diolah dengan EViews 4.1.

**GRAFIK 4.1.**  
**GAP PERTUMBUHAN ANTARA**  
**PENERIMAAN PAJAK DENGAN PENGELUARAN PEMERINTAH**

Perbedaan pola pergerakan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak menyebabkan terjadinya *gap* pertumbuhan diantara keduanya (lihat Grafik 4.1.). Implikasi dari fenomena tersebut berupa indikasi bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang ditentukan secara politis (berdasar kebijakan) dan tidak semata-mata mengikuti asumsi penerimaan negara.

## 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1. Uji Akar Unit

Dalam proses pengolahan data, Enders (2004) menyarankan penggunaan uji akar unit sebagai metode untuk mendeteksi stasioneritas pada sebuah variabel. Uji akar unit mempunyai 3 tingkat (ordo) variabel yang akan diuji, yaitu

tingkat nominal data (*level*), turunan tingkat pertama (*first difference*) dan turunan tingkat kedua (*second difference*). Pada setiap tingkat sendiri terdapat dua komponen yang digunakan, yaitu *trend* dan *drift* (konstanta dari uji akar unit). Selama pengujian, kedua komponen tersebut dapat digunakan semuanya, atau konstanta saja atau tidak keduanya.

Secara lebih spesifik, Dolado *et al* (1990) membuat sebuah kerangka tahapan analisis uji akar unit, kemudian kerangka tersebut disempurnakan oleh Enders (2004). Tahapan tersebut dapat terangkum sebagai berikut:

1. Uji akar unit variabel diawali dengan tingkat terendah dan model yang paling kompleks, yaitu *level* dan menyertakan *trend* serta konstanta dalam model pengujian.
2. Apabila *trend* dalam kondisi pengujian di atas tidak menghasilkan akar unit, maka *trend* dihilangkan. Dan seterusnya komponen (*trend* dan konstanta) dalam uji akar unit dapat dihilangkan hingga pada kondisi model yang paling sederhana (tanpa *trend* dan konstanta).
3. Apabila hasil pengujian uji akar unit pada tingkat terendah (*level*) dan model yang paling sederhana belum menghasilkan akar unit, maka pengujian dilanjutkan pada tingkat selanjutnya (turunan tingkat pertama atau *first difference*).
4. Langkah pertama dan kedua dalam tahapan uji akar unit diulangi lagi, selanjutnya sampai dengan tingkat variabel selanjutnya (turunan tingkat kedua atau *second difference*) hingga ditemui fenomena akar unit dalam variabel.

**TABEL 4.4.**  
**HASIL UJI AKAR UNIT**  
**VARIABEL PENGELUARAN PEMERINTAH**

Variabel	Ordo / Tingkat	Exogenous	t-Statistic	Prob.*	
<b>Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>Level</b>	<b>Constant</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.689508	0.9891
			Test critical values: 1% level	-3.752946	
			5% level	-2.998064	
		10% level	-2.638752		
		<b>Constant, Linear</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.260610	0.8723
			Test critical values: 1% level	-4.416345	
	5% level		-3.622033		
	<b>Trend</b>	Test critical values: 10% level	-3.248592		
		<b>None</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.979760	0.9856
			Test critical values: 1% level	-2.669359	
	5% level		-1.956406		
	10% level	-1.608495			
<b>First Difference</b>	<b>Constant</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.547316	0.0162*	
		Test critical values: 1% level	-3.769597		
		5% level	-3.004861		
	10% level	-2.642242			
	<b>Constant, Linear</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.775584	0.0380*	
		Test critical values: 1% level	-4.440739		
5% level		-3.632896			
<b>Trend</b>	Test critical values: 10% level	-3.254671			
	<b>None</b>	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.026932	0.0042*	
		Test critical values: 1% level	-2.674290		
5% level		-1.957204			
10% level	-1.608175				

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: hasil pengolahan

Pengujian akar unit dalam variabel penelitian (penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah) mengikuti kaidah pengujian di atas. Hasil pengujian akar unit pengeluaran pemerintah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4. menunjukkan hasil bahwa fenomena stasioneritas terjadi pada tingkat turunan pertama (*first difference*) dengan menyertakan *trend* dan konstanta, maupun konstanta tanpa *trend*, hingga tanpa *trend* dan konstanta. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai *probability* dari setiap tahap pengujian yang menunjukkan nilai di bawah 5% (0,05) dan ditunjukkan dengan tanda bintang ( \* ). Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut adalah fenomena stasioneritas terjadi untuk variabel pengeluaran pemerintah pada model dengan *trend* dan konstanta, model dengan

konstanta serta model tanpa konstanta dan *trend* pada tingkat turunan pertama (*first difference*) dari variabel.

**TABEL 4.5.**  
**HASIL UJI AKAR UNIT**  
**VARIABEL PENERIMAAN PAJAK**

Variabel	Ordo / Tingkat	Exogenous	t-Statistic	Prob.*		
Penerimaan Pajak	Level	Constant	Augmented Dickey-Fuller test statistic	3.158551	1.0000	
			Test critical values:	1% level	-3.959148	
				5% level	-3.081002	
	10% level	-2.681330				
	Level	Constant, Linear Trend	Augmented Dickey-Fuller test statistic	3.417787	1.0000	
			Test critical values:	1% level	-4.728363	
				5% level	-3.759743	
	10% level	-3.324976				
	Level	None	Augmented Dickey-Fuller test statistic	4.838950	1.0000	
			Test critical values:	1% level	-2.708094	
				5% level	-1.962813	
	10% level	-1.606129				
Penerimaan Pajak	First Difference	Constant	Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.401179	0.9998	
			Test critical values:	1% level	-4.004425	
				5% level	-3.098896	
	10% level	-2.690439				
	First Difference	Constant, Linear Trend	Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.698965	0.9999	
			Test critical values:	1% level	-4.800080	
				5% level	-3.791172	
	10% level	-3.342253				
	First Difference	None	Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.671775	0.9956	
			Test critical values:	1% level	-2.740613	
				5% level	-1.968430	
	10% level	-1.604392				
Penerimaan Pajak	Second Difference	Constant	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.386730	0.8910	
			Test critical values:	1% level	-3.886751	
				5% level	-3.052169	
	10% level	-2.666593				
	Second Difference	Constant, Linear Trend	Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.995084	0.5601	
			Test critical values:	1% level	-4.667883	
				5% level	-3.733200	
	10% level	-3.310349				
	Second Difference	None	Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.610355	0.9669	
			Test critical values:	1% level	-2.728252	
				5% level	-1.966270	
	10% level	-1.605026				

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber: hasil pengolahan

Hasil pengujian akar unit penerimaan pajak sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5. menunjukkan hasil bahwa fenomena stasioneritas tidak terjadi pada semua tingkat mulai dari tingkat *level*, turunan pertama (*first difference*) hingga turunan tingkat kedua (*second difference*) dengan menyertakan *trend* dan konstanta, maupun konstanta tanpa *trend*, hingga tanpa *trend* dan konstanta. Hal

tersebut dibuktikan oleh nilai *probability* dari setiap tahap pengujian yang menunjukkan nilai di atas 5% (0,05). Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut adalah fenomena stasioneritas tidak terjadi pada variabel penerimaan pajak.

#### 4.2.2. Uji Kointegrasi

Kondisi kointegrasi dalam beberapa literatur ekonometrika merupakan sebuah keadaan yang merujuk tentang keberadaan kombinasi *linear* (integrasi) dari variabel-variabel yang non stasioner. Beberapa menyebutkan bahwa kointegrasi merupakan sebuah keadaan *equilibrium* jangka panjang dari variabel nonstasioner dalam jangka pendek (Enders, 2004).

Uji kointegrasi yang dikemukakan oleh Johanssen mempunyai beberapa perbedaan asumsi dengan pengujian kointegrasi yang dikemukakan oleh Engle-Granger. Perbedaan pertama, uji kointegrasi Engle-Granger hanya dapat melacak satu persamaan kointegrasi dalam model, sedangkan uji kointegrasi johansen dapat melacak persamaan kontegrasi lebih dari satu persamaan. Perbedaan kedua, uji kointegrasi Engle-Granger mempunyai basis estimasi untuk mengeluarkan *error correction term* dengan metode *ordinary least square*, sedangkan uji kointegrasi Johanssen mempunyai basis estimasi dengan *vector auto regression*. Perbedaan ketiga, pada uji kointegrasi Johanssen dapat digunakan komponen dalam persamaan kointegrasi secara lebih kompleks (tanpa *trend* dan tanpa *intercept*; dengan *intercept* dan tanpa *trend*) dan asumsi pada *trend* data (*linear* atau kuadrat), sedangkan pada uji kointegrasi Engle-Granger tidak terdapat konsep perhitungan semacam itu.

Pada pengujian kointegrasi variabel penelitian (penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah) menggunakan asumsi *trend* data yang *linear* sedangkan pada persamaan kointegrasi terdapat *intercept*, namun tanpa *trend*. Penggunaan asumsi tersebut didasari oleh pergerakan data aktual yang terlihat pada Grafik 4.1..

Hasil pengujian kointegrasi Johansen yang diestimasi dengan *software statistic* EViews 4.1. menghasilkan rangkuman beberapa hasil uji pada asumsi data yang berbeda-beda (lihat Tabel 4.6). Penentuan tentang kointegrasi sendiri menggunakan pendekatan *model selection criterion* yang ditawarkan oleh AIC (*Akaike Information Criterion*) dan SC (*Schwarz Information Criterion*).

**TABEL 4.6.**  
**HASIL UJI KOINTEGRASI JOHANSEN**

Data Trend:	None	None	Linear	Linear	Quadratic
Rank or No. of CEs	No Intercept No Trend	Intercept No Trend	Intercept No Trend	Intercept Trend	Intercept Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)					
Trace	2	2	2	2	1
Max-Eig	2	2	2	0	0
Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)					
0	-497.5999	-497.5999	-495.6919	-495.6919	-490.2204
1	-489.4694	-489.3409	-488.1954	-487.5164	-482.3473
2	-485.5984	-481.9546	-481.9546	-480.7514	-480.7514
Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)					
0	45.59999	45.59999	<b>45.60836</b>	45.60836	45.29276
1	45.22449	45.30371	<b>45.29049</b>	45.31967	44.94067*
2	45.23622	45.08678	<b>45.08678</b>	45.15922	45.15922
Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)					
0	45.79836	45.79836	<b>45.90591</b>	45.90591	45.68951
1	45.62123	45.75005	<b>45.78642</b>	45.86519	45.53578*
2	45.83134	45.78108	<b>45.78108</b>	45.95271	45.95271

Sumber: hasil pengolahan

Berdasarkan asumsi data dalam penelitian, maka daerah penentuan kointegrasi berada pada kolom ketiga dari sebelah kiri (daerah arsiran) dan nilai yang digunakan untuk menentukan keberadaan kointegrasi adalah nilai dalam daerah arsiran pada baris AIC dan SC (nilai yang dicetak tebal). Penentuan

kointegrasi didasari oleh nilai yang dicetak tebal dan mempunyai tanda bintang ( \* ). Pada hasil perhitungan di atas, tidak ditemukan keberadaan kointegrasi dalam model estimasi. Oleh karena itu, dalam model penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel penelitian.

#### 4.2.3. Uji *Lag Length Optimal*

Salah satu kelemahan dalam metode *vector auto regression* adalah penentuan panjang *lag* dalam model penelitian. Penentuan panjang *lag* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan AIC dan SC. Penentuan *lag* yang optimal didasarkan oleh nilai AIC maupun SC yang paling rendah. Apabila tidak ditemui kesamaan saran *lag optimal* dari AIC maupun SC, maka penentuan *lag optimal* ditentukan dengan metode AIC pada jumlah sampel yang kecil (kurang dari 50) dan SC untuk sample besar.

Penentuan panjang *lag* yang optimal tidak hanya melibatkan variabel pada tingkat *first difference* saja, namun juga variabel pada tingkat *second difference* dan *level*. Keputusan ini didasari oleh hasil uji stasioneritas yang menunjukkan fenomena stasioneritas pada tingkat *first difference* untuk variabel pengeluaran pemerintah, sedangkan untuk variabel penerimaan pajak tidak ditemui fenomena stasioneritas pada setiap tingkatan (ordo) variabelnya.

TABEL 4.7.

## ESTIMASI PENENTUAN PANJANG LAG

Ordo / Tingkat	Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
<i>Level</i>	0	-539.5358	NA	8.23E+18	49.23053	49.32972	49.25390
	1	-488.2542	88.57732	1.12E+17	44.93220	45.22976	45.00230
	2	-481.9546	9.735825*	9.23E+16*	44.72314*	45.21907*	44.83997*
<i>First Difference</i>	0	-500.8894	NA*	2.45E+17	45.71722	45.81641*	45.74059
	1	-495.6919	8.977543	2.21E+17*	45.60836*	45.90591	45.67845*
<i>Second Difference</i>	0	-481.8722	NA*	3.54E+17*	46.08307*	46.18255*	46.10466*
	1	-478.1428	6.393383	3.64E+17	46.10883	46.40727	46.17360

\* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Sumber: hasil pengolahan

Pada tabel 4.7. diperoleh hasil *lag* yang optimal berada pada variabel dengan tingkat *first difference* dengan panjang *lag* 1 periode sebelum (AIC) dan *lag* ke-0 (SC). Pada variabel dengan tingkat *second difference* diperoleh panjang *lag* ke-0 (AIC dan SC). Pada variabel dengan tingkat *level* diperoleh hasil *lag* yang optimal pada periode ke-2 (AIC dan SC). Kesimpulan dari hasil penentuan panjang *lag* yang optimal merujuk kepada variabel dengan tingkat *first difference* pada panjang *lag* ke-1

#### 4.2.4. Uji Kausalitas Granger

Serupa dengan penentuan panjang *lag*, estimasi kausalitas oleh model Granger melibatkan simulasi dari semua tingkat (ordo) variabel dalam penelitian. Pengujian ini melibatkan variabel pada tingkat *level* dengan panjang *lag* 1 dan 2, serta variabel pada tingkat *first difference* dengan panjang *lag* ke-1 dan variabel pada tingkat *second difference* dengan panjang *lag* ke-1. Pada variabel dengan tingkat *second difference* digunakan estimasi *lag* ke-1, meskipun saran penentuan

*lag optimal* sebesar *lag ke-0* disebabkan oleh sifat uji kausalitas Granger yang menitik beratkan pada pengaruh variabel itu sendiri dengan variabel lainnya pada panjang *lag minimal lag pertama*.

TABEL 4.8.

## HASIL UJI KAUSALITAS GRANGER

Ordo / Tingkat	Lag ke-	Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
<i>Level</i>	1	GX does not Granger Cause TR TR does not Granger Cause GX	23	0.60401 6.64265	0.44615 0.01799
	2	GX does not Granger Cause TR TR does not Granger Cause GX	22	0.66231 7.94062	0.52847 0.00367
<i>First Difference</i>	1	D(GX) does not Granger Cause D(TR) D(TR) does not Granger Cause D(GX)	22	1.24834 0.25896	0.27780 0.61669
	1	D(D(GX)) does not Granger Cause D(D(TR)) D(D(TR)) does not Granger Cause D(D(GX))	21	0.01990 1.97379	0.88939 0.17707

Sumber: hasil pengolahan

Hasil pengujian kausalitas Granger menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pada variabel dengan tingkat *level* dan *lag ke-1* diperoleh hasil terjadi hubungan yang searah dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak.
2. Pada variabel dengan tingkat *level* dan *lag ke-2* diperoleh hasil terjadi hubungan yang searah dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak.
3. Pada variabel dengan tingkat *first difference* dan *lag ke-1* diperoleh hasil bahwa tidak terjadi hubungan antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah.
4. Pada variabel dengan tingkat *second difference* dan *lag ke-1* diperoleh hasil bahwa tidak terjadi hubungan antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah.

Secara statistik, hal tersebut dibuktikan oleh nilai F-Statistik yang lebih besar daripada nilai F-Tabel dan diindikasikan oleh nilai *probability* yang berada di bawah nilai 5% (0,05). Kesimpulan dari uji kausalitas Granger adalah tidak ditemui adanya hubungan antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah, dimana model yang digunakan sebagai kesimpulan adalah model dengan variabel tingkat *first difference* dengan panjang *lag* ke-1.

#### 4.2.5. Uji *Vector Auto Regression*

Melalui kesimpulan hasil pengujian sebelumnya mendapatkan hasil sebagai dasar penentuan model estimasi VAR sebagai berikut:

1. Fenomena stasioneritas terjadi untuk variabel pengeluaran pemerintah pada model dengan *trend* dan konstanta, model dengan konstanta serta model tanpa konstanta dan *trend* pada tingkat turunan pertama (*first difference*) dari variabel.
2. Fenomena stasioneritas tidak terjadi pada variabel penerimaan pajak.
3. Tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel-variabel penelitian (tidak ada kointegrasi).
4. Hasil penentuan panjang *lag* yang optimal merujuk kepada variabel dengan tingkat *first difference* pada panjang *lag* ke-1.
5. Kesimpulan dari uji kausalitas Granger adalah tidak ditemui adanya hubungan antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah, dimana model yang digunakan sebagai kesimpulan adalah model dengan variabel tingkat *first difference* dengan panjang *lag* ke-1.

Berdasarkan hasil uji sebelumnya, diperoleh hasil estimasi VAR dengan variabel turunan tingkat pertama dan pada *lag* ke-1 sebagai berikut

**TABEL 4.9.**  
**HASIL UJI VAR**  
**DENGAN VARIABEL *FIRST DIFFERENCE***

Vector Autoregression Estimates  
Date: 09/13/06 Time: 07:56  
Sample(adjusted): 1981 2006  
Included observations: 25 after adjusting endpoints  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	D(TR)	D(GX)
D(TR(-1))	0.643184 (0.19970) [ 3.22080]	0.308917 (0.60705) [ 0.50889]
D(GX(-1))	-0.102236 (0.09150) [-1.11729]	0.042645 (0.27815) [ 0.15331]
C	6143.460 (3303.62) [ 1.85961]	11270.92 (10042.4) [ 1.12233]
R-squared	0.353159	0.019727
Adj. R-squared	0.285070	-0.083460
Sum sq. resids	2.65E+09	2.63E+10
S.E. equation	12245.14	37223.10
F-statistic	5.186763	0.191178
Log likelihood	-236.6875	-261.1471
Akaike AIC	21.78977	24.01337
Schwarz SC	21.93855	24.16215
Mean dependent	11936.73	15045.01
S.D. dependent	14482.12	35760.71
Determinant Residual Covariance		1.71E+17
Log Likelihood (d.f. adjusted)		-498.9172
Akaike Information Criteria		45.90156
Schwarz Criteria		46.19912

Sumber: hasil pengolahan

Selain itu, Sims dalam Enders (2004) mempunyai argumen mengenai penggunaan ordo variabel dalam model VAR. Menurut Sims, VAR adalah sebuah metode prediksi yang bertujuan untuk menemukan fenomena interaksi antar variabel. Anggapan tersebut berimplikasi kepada penggunaan ordo variabel dalam VAR. Dengan kata lain, penggunaan metode VAR membutuhkan data pada tingkat *level*. Berdasarkan pendapat Sims tersebut, maka penggunaan variabel

dalam model VAR berdasar pada tingkat *level*. Sedangkan hasil estimasi VAR menurut pendapat Sims adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.10.**  
**HASIL UJI VAR**  
**DENGAN VARIABEL *LEVEL***

Vector Autoregression Estimates  
Date: 09/09/06 Time: 07:08  
Sample(adjusted): 1981 2006  
Included observations: 25 after adjusting endpoints  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

	TR	GX
TR(-1)	0.817822 (0.27968) [ 2.92410]	-0.974114 (0.81197) [-1.19969]
TR(-2)	0.310575 (0.33055) [ 0.93958]	2.158945 (0.95964) [ 2.24976]
GX(-1)	0.022650 (0.08283) [ 0.27346]	1.002385 (0.24047) [ 4.16850]
GX(-2)	0.058215 (0.08824) [ 0.65971]	-0.611294 (0.25619) [-2.38613]
C	-419.0857 (3828.66) [-0.10952]	25194.36 (11109.5) [ 2.26782]
R-squared	0.988168	0.928010
Adj. R-squared	0.985384	0.911072
Sum sq. resids	1.62E+09	1.36E+10
S.E. equation	9747.979	26300.12
F-statistic	354.9528	54.78627
Log likelihood	-230.4465	-253.8942
Akaike AIC	21.40422	23.53584
Schwarz SC	21.65219	23.78360
Mean dependent	72009.92	121428.6
S.D. dependent	80631.52	94900.42
Determinant Residual Covariance		6.13E+16
Log Likelihood (d.f. adjusted)		-487.6268
Akaike Information Criteria		45.23880
Schwarz Criteria		45.73473

Sumber: hasil pengolahan

Terdapat perbedaan pokok antara dua model VAR di atas, yaitu pada penggunaan ordo dari variabel. Sebagaimana diketahui, pada dua model tersebut menghasilkan output yang berbeda. Model pertama, yaitu VAR dengan variabel tingkat turunan pertama mempunyai hasil sebagai berikut: nilai  $R^2$  untuk masing-

masing variabel model endogen adalah 35,31% dan 1,97%. Pada model VAR dengan variabel tingkat *level* mempunyai hasil sebagai berikut: nilai  $R^2$  untuk masing-masing variabel model endogen adalah 98,81% dan 92,80%. Implikasi dari hasil tersebut berupa *determinant residual covariance* pada model pertama adalah  $1.71 \times 10^{17}$ , sedangkan pada model kedua adalah  $6.13 \times 10^{16}$ .

Penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui metode *model selection criterion* yang ditawarkan oleh nilai AIC dan SC. Pemilihan model penelitian didasarkan pada model dengan nilai AIC atau SC yang paling kecil. Nilai AIC maupun SC pada model pertama sebesar 45,90 dan 46,19. Pada model kedua, nilai AIC maupun SC adalah 45,23 dan 45,73. Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa model yang digunakan sebagai alat analisis adalah model kedua, yaitu model dengan variabel pada ordo *level* dan *lag 2*.

#### **4.2.6. Innovation Accounting**

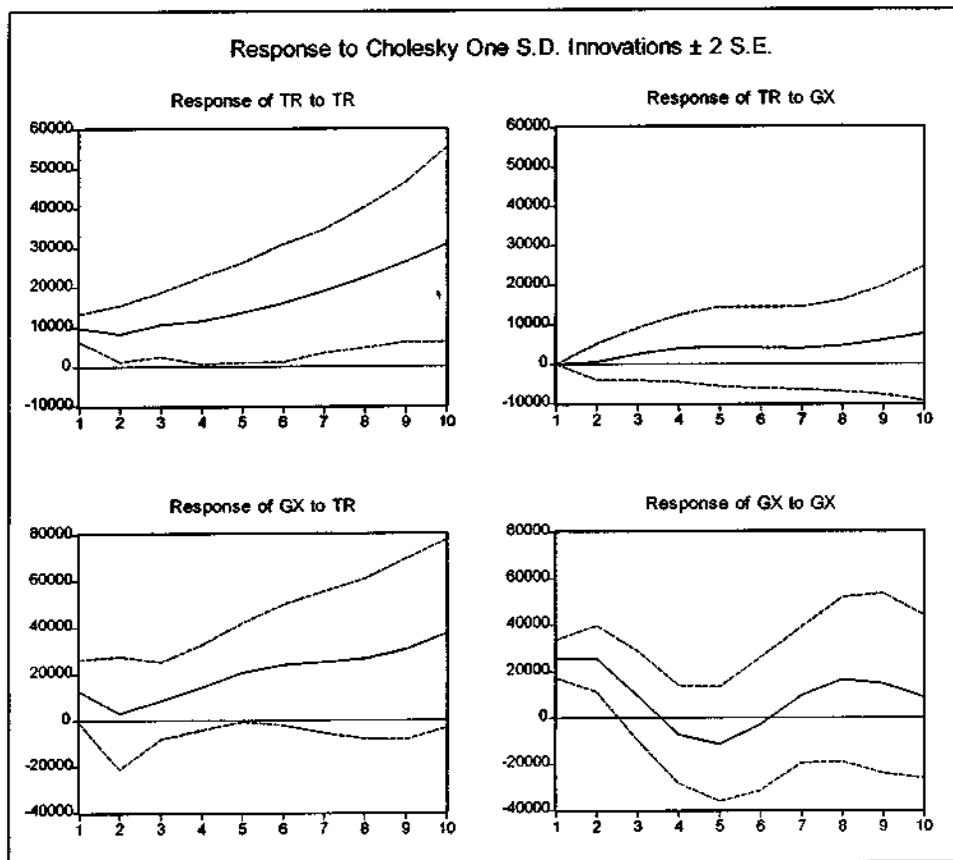
Sebagai alat analisis, uji VAR tidak bisa berdiri sendiri karena beberapa asumsi model yang terdapat pada model VAR. Dalam peranannya sebagai sebuah model prediksi atau *forecast model*, VAR berfungsi atau bertujuan mengamati *contemporaneous effect* (efek kontemporer) dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis mengenai efek kontemporer dan proporsi dari guncangan satu variabel yang menyebabkan perubahan variabel lainnya akan dianalisis menggunakan alat *impulse response function* dan *forecast error variance decompositions*.

#### 4.2.6.1. Impulse Response Function

*Impulse response function* (IRF) mempunyai tujuan untuk menganalisis seberapa lama guncangan dari sebuah variabel akan merubah posisi variabel lainnya. Kontinuitas sebuah efek guncangan dalam variabel tertentu menyebabkan sifat perubahan yang *persistence* (permanen) dalam variabel.

GRAFIK 4.2.

#### IMPULSE RESPONSE FUNCTION



Sumber: hasil pengolahan

Berdasarkan hasil uji VAR sebelumnya diperoleh hasil IRF sebagaimana berikut (lihat Grafik 4.2.): efek dari guncangan variabel pengeluaran pemerintah (GX) ternyata mempunyai efek yang menetap terhadap penerimaan pajak (TR)

dan hal tersebut dibuktikan oleh grafik IRF dari GX yang tidak memotong sumbu  $x$  lagi. Pada variabel penerimaan pajak berlaku juga hal yang serupa, efek dari variabel pengeluaran pemerintah bersifat menetap terhadap variabel penerimaan pajak.

#### **4.2.6.2. Forecast Error Variance Decompositions**

Melalui tabel hasil *forecast error variance decompositions* dapat diketahui peningkatan atau penurunan proporsi masing-masing guncangan atas satu variabel terhadap variabel lainnya. Peningkatan atau penurunan ini membawa kepada implikasi pada peranan sebuah variabel dalam merubah variabel lainnya.

Tabel 4.10. menjelaskan tentang perubahan proporsi tersebut. Pada periode pertama hingga periode ke-sepuluh dalam variabel penerimaan pajak (TR) terjadi peningkatan proporsi guncangan yang menetap dalam variabel TR yang disebabkan oleh variabel pengeluaran pemerintah. Pada variabel pengeluaran pemerintah terdapat perbedaan, guncangan yang disebabkan oleh variabel penerimaan pajak sempat mengalami penurunan proporsi pada periode ke-2, namun kembali naik lagi hingga periode ke-10. Perbedaan yang lain lagi adalah proporsi guncangan yang disebabkan oleh variabel TR terhadap GX adalah lebih besar dibandingkan dengan proporsi guncangan yang disebabkan oleh variabel GX terhadap TR.

**TABEL 4.11.**  
**FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITIONS**

Period	Variance Decomposition of TR:		
	S.E.	TR	GX
1	9747.979	100.0000	0.000000
		(0.00000)	(0.00000)
2	12786.78	99.79770	0.202303
		(4.29989)	(4.29989)
3	16784.11	97.61937	2.380634
		(7.60507)	(7.60507)
4	20767.66	94.84775	5.152247
		(10.4814)	(10.4814)
5	25189.11	93.46219	6.537812
		(12.2231)	(12.2231)
6	30110.77	93.54722	6.452777
		(13.0585)	(13.0585)
7	35833.81	94.19484	5.805160
		(12.9618)	(12.9618)
8	42539.37	94.70565	5.294347
		(12.5480)	(12.5480)
9	50377.68	94.83045	5.169548
		(12.2613)	(12.2613)
10	59497.95	94.66832	5.331676
		(12.2582)	(12.2582)

Period	Variance Decomposition of GX:		
	S.E.	TR	GX
1	28300.12	19.50036	80.49964
		(15.8836)	(15.8836)
2	38182.25	11.34290	88.65710
		(14.1236)	(14.1236)
3	40217.34	14.58955	85.41045
		(15.0829)	(15.0829)
4	43239.22	23.24212	76.75788
		(14.6483)	(14.6483)
5	49229.63	35.33720	64.66280
		(14.8572)	(14.8572)
6	54736.68	47.42994	52.57006
		(15.5457)	(15.5457)
7	60939.30	55.07381	44.92619
		(15.7989)	(15.7989)
8	68442.43	58.63555	41.36445
		(16.5241)	(16.5241)
9	76335.19	63.04022	36.95978
		(17.3550)	(17.3550)
10	85362.33	69.36625	30.63375
		(17.9145)	(17.9145)

Cholesky Ordering: TR GX  
Standard Errors: Monte Carlo (100 repetitions)

Sumber: hasil pengolahan

#### 4.3. Pembahasan

Kerangka analisis dalam model VAR mengikuti kaidah berikut; uji kausalitas Granger merupakan metode untuk menentukan *path* (alur) variabel dalam model VAR diperoleh hasil pada variabel pada tingkat *level* dan *lag* ke - 1 terjadi hubungan yang searah dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan

pajak. Sedangkan IRF dan FEVD berfungsi sebagai pendeteksi efek kontemporer maupun kontribusi proporsi perubah variabel, penelitian ini menghasilkan alur variabel dari variabel pengeluaran pemerintah menuju kepada variabel penerimaan pajak. Hasil dari IRF dan FEVD menyimpulkan bahwa terjadi perubahan yang permanen dari variabel-variabel dalam model VAR yang disebabkan oleh guncangan variabel lainnya, sedangkan proporsi guncangan terbesar diakibatkan oleh variabel pengeluaran pemerintah atas penerimaan pajak.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dugaan adanya hubungan interdependensi antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah tidak terbukti. Terjadi hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak di Indonesia, yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi penerimaan perpajakan. Hasil ini sesuai dengan pernyataan *Spend-tax hypothesis* yang dikemukakan oleh Barro yang artinya suatu negara akan menentukan besarnya pengeluaran terlebih dahulu dan kemudian mencari sumber daya untuk membiayai pengeluaran tersebut, terjadinya resesi ekonomi tahun 1982 dan krisis ekonomi tahun 1997 menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat drastis sehingga timbul reformasi pajak yang dimulai tahun 1983 untuk mengimbangi pengeluaran yang meningkat tersebut, serta alasan lainnya yaitu meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), perbaikan sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, perbaikan birokrasi dan lain-lain yang menyebabkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan

kesejahteraan masyarakat juga meningkat pula, kondisi ini secara otomatis akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

Sebaliknya penerimaan pajak tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah disebabkan sebagaimana diketahui pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat meskipun penerimaan disektor pajak menurun, dikarenakan adanya upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya pengeluaran rutin dan pembangunan, meskipun penerimaan pajak turun tidak serta merta akan menurunkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah dapat menggunakan hutang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai alternatif lain dalam sumber dana pembiayaannya.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan interdependensi antara pengeluaran pajak dan penerimaan pajak di Indonesia periode 1980 – 2006. dari hasil uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah dari pengeluaran pemerintah ke penerimaan pajak di Indonesia selama periode 1980 – 2006 untuk kasus *time lag* 1 tahun. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah satu tahun yang lalu mempengaruhi penerimaan perpajakan pada tahun yang sedang berjalan. Keadaan ini sesuai dengan teori *spend-tax hypothesis* yang dikemukakan Barro yang menyatakan bahwa pajak menyesuaikan pengeluaran pemerintah, artinya kenaikan penerimaan pajak sebagai hasil dari tingginya pengeluaran fiskal, dalam hal ini terdapat hubungan kausal yang bergerak dari pengeluaran pemerintah ke penerimaan perpajakan pemerintah (satu arah).

Besarnya pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi penerimaan pajak tersebut dapat ditunjukkan baik dengan memberlakukan serangkaian undang-undang lama, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Reformasi Perpajakan Tahun 1983. Dalam perkembangan selanjutnya undang-undang perpajakan tersebut mengalami beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk menopang pengeluaran pemerintah yang terus meningkat.

## 5.2. Saran

Dalam penyusunan APBN harus mencerminkan posisi pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain oleh pemerintah, misalnya melakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai sasaran dan program di bidang fiskal, yaitu dengan lebih mengutamakan penyediaan anggaran bagi perluasan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah-daerah, serta penyediaan subsidi bahan kebutuhan pokok. Adanya hubungan yang erat antar fasilitas penggunaan dana oleh pemerintah dan penarikannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Penekanan pengeluaran pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif dan tidak efisien secara intensif harus dilakukan seperti pengeluaran untuk mobil dinas, kunjungan ke luar negeri, sistem birokrasi yang kurang efektif, dan lain-lain yang akan menyebabkan terjadinya defisit yang berlebihan, dan nantinya berimbas pada upaya peningkatan pajak yang tak terkontrol yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan sektor swasta, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pada pendapatan pemerintah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin , Agustina (Ed). 1989. *Pokok – pokok pikiran Salamun A. T. Pajak citra dan bebannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta Pariwara.
- BPS Surabaya, berbagai tahun penerbitan.
- Buku Pedoman Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Depkeu R.I., Nota Perhitungan Anggaran Negara, Jakarta, 2000 – 2004
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Enders, Walter.2004. *Applied Econometrics Time Series*, Iowa; John Wiley and sons, Inc
- Friedman, Milton. 1991. *Moneterist Economics*, Basil Blackwell Ltd.
- Gujarati, Damodar, N. *Basic Econometrics*, Mc Graw-Hill
- Mangkusubroto, Guritno, 1993. *Ekonomi Publik*, Jogjakarta, BPFE.
- Muhammad, Mar'ie. 1989. *Faktor Penunjang Keberhasilan Bidang Perpajakan*, dalam Mingguan Berita Pajak. Jakarta
- Musgrave, Richard A., and Peggy B Musgrave, 1989, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, terjemahan, Jakarta, Gramedia.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Economics 15th Edition*, Penerbit Erlangga.
- Rosyidi, Suherman, 1998, *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal BPK, 1998, *Keuangan Negara dan BPK*, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. FE UI dan Bima Grafika.

Suparmoko, 1986, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE.

Syamsi, Ibnu, 1994, *Dasar – Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.

Thomas, R.L.1997. *Modern Econometrics (an Introduction)*, Addison-Wesley